

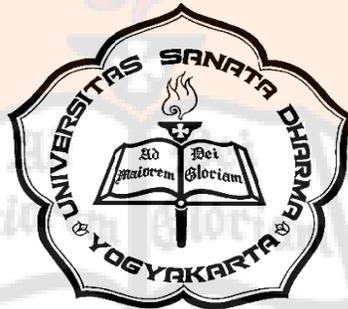
**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN  
MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Yessy Melania

NIM : 07 2114 036

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2011**

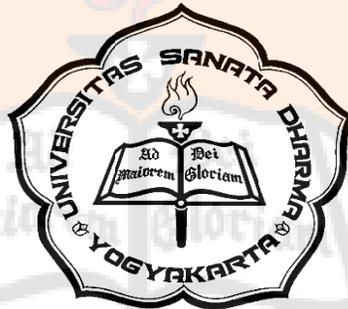
**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN  
MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Yessy Melania

NIM : 07 2114 036

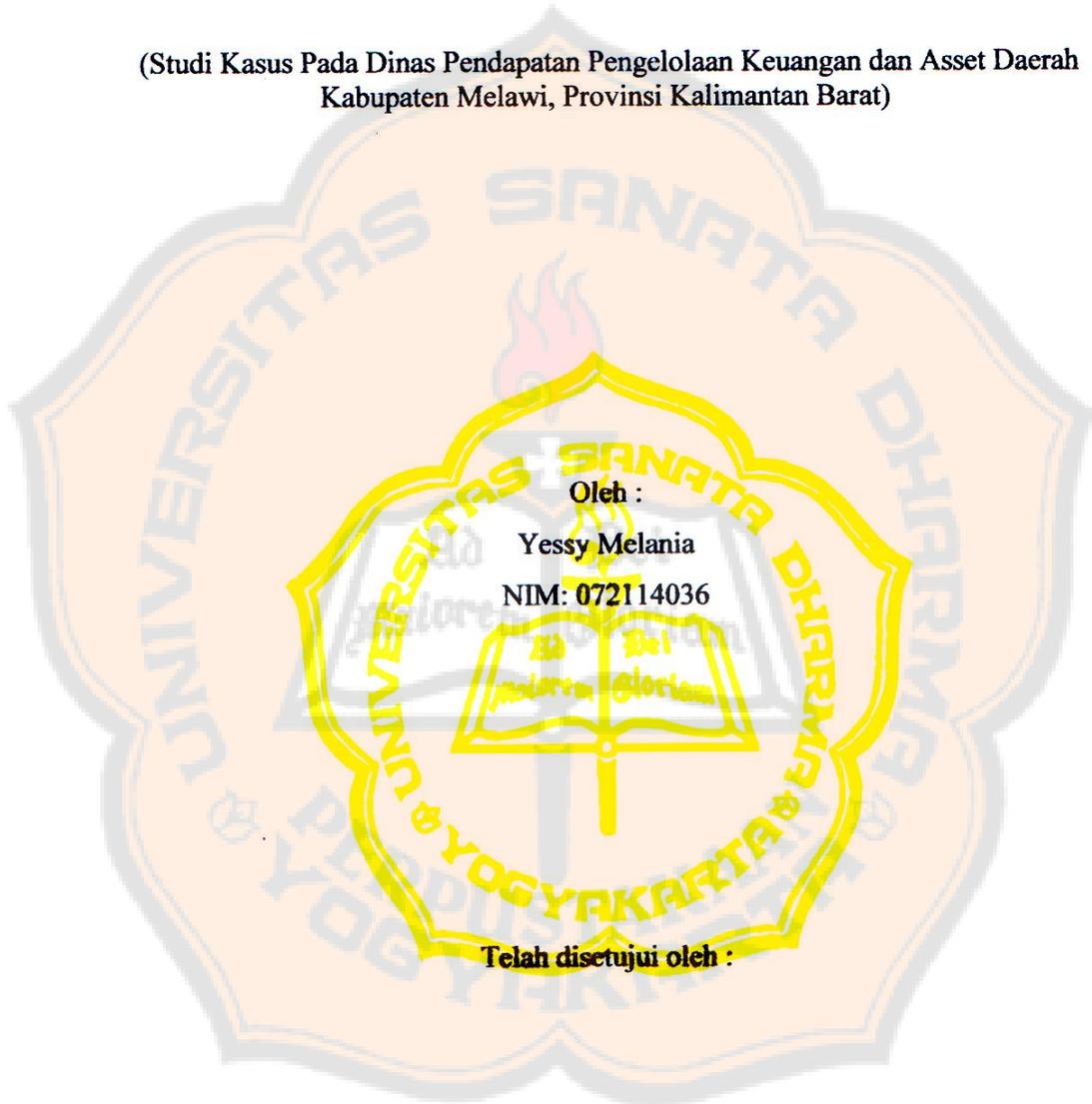
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2011**

Skripsi

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat)



Oleh :

Yessy Melania

NIM: 072114036

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Diksa Kuntara', is positioned below the 'Pembimbing I' label.

A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA

Tanggal 5 September 2011

Skripsi

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Yessy Melania

NIM: 072114036

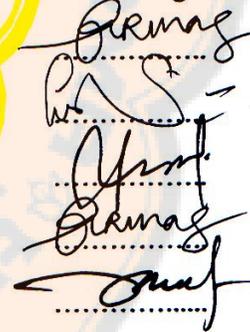
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 September 2011  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA  
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA  
Anggota : A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA  
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA  
Anggota : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 September 2011  
Fakultas Ekonomi,  
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

"janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada  
Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur"

(Filipi 4:6)



Kupersembahkan untuk:

Jesus Kristus

Papa dan Mama tersayang

Adikku Lilis dan Agnes

My beloved Dian Yuda

Semua Keluarga Besarku



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 05 September 2011

Yang membuat pernyataan,

Yessy Melania

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yessy Melania

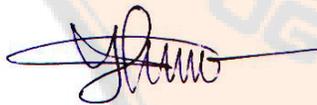
Nomor Mahasiswa : 072114036

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 05 September 2011

Yang membuat pernyataan



Yessy Melania

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan cinta, kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
5. Antonius Diksa Kuntara, S.E, MFA., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, semangat, masukan serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pengajaran ilmu pengetahuan serta seluruh Staf dan Karyawan khususnya Fakultas Ekonomi dan Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu menyediakan buku-buku yang dibutuhkan penulis.
7. Yang tersayang Papa dan Mama, yang sangat peduli dengan pendidikanku, selalu mensupport baik materi dan moril, selalu mengiringi perjalananku dengan doa dan harapan.
8. Adikku Lilis yang membelikanku buku dan memberiku modul untuk menunjang bahasan skripsi ini dan Agnes yang selalu membuatku tertawa disaat kebingungan dan kejenuhan muncul.
9. Abangku Lapin, yang memberikan motivasi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Yang terkasih Dian Beni Yuda, yang selalu ada disaat aku butuh tempat untuk berkeluh kesah, memberikan solusi dan motivasi disaat aku jenuh, peduli terhadap kesehatanku dan selalu mengirimkanku makanan disaat aku lembur untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teman-temanku Nidya Simatauw, Maria Gian, Putrie Krissetyasari, Tanti Herin, Fury Anti Respati, Nova Astri, Dian Andika, Cecilia Winda, Genoveva Marlina, Shaun yang telah menemani disaat aku bimbingan, selalu ada saat aku butuh masukan dan saran. Semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap utuh sampai dikemudian hari.
12. Teman-teman seperjuangan MPT yang selalu memberikan masukan dan memberikan semangat.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 05 September 2011

Yessy Melania



**DAFTAR ISI**

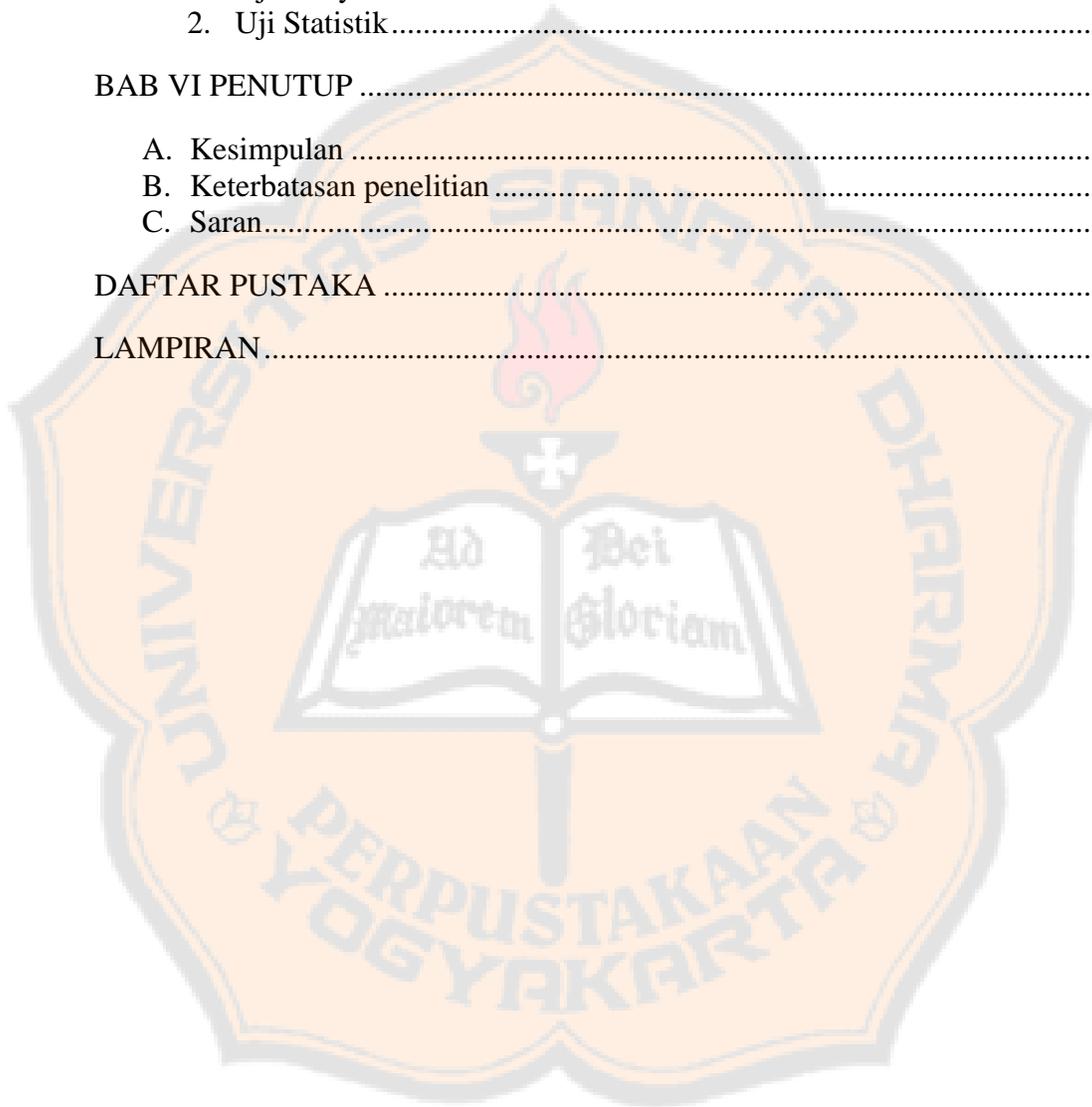
|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                 | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                              | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                             | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....         | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....        | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                 | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                      | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                    | xiii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                   | xiv  |
| ABSTRAK.....   | xv   |
| ABSTRACK.....  | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                               | 1    |
| A. Latar Belakang.....                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                              | 3    |
| C. Batasan Masalah.....                              | 3    |
| D. Tujuan Penelitian.....                            | 4    |
| E. Manfaat Penelitian.....                           | 4    |
| F. Sistematika Penulisan.....                        | 5    |
| BAB II LANDASAN TEORI.....                           | 7    |
| A. Pendapatan Asli Daerah.....                       | 7    |
| B. Perpajakan.....                                   | 8    |
| 1. Pajak.....  | 8    |
| 2. Pajak Hotel.....                                  | 21   |
| 3. Mekanisme dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....  | 25   |
| C. Konsep Efektivitas.....                           | 30   |
| D. Administrasi Perpajakan.....                      | 32   |
| E. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah..... | 36   |

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

|  |           |
|--|-----------|
| F. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....   | 36        |
| 1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....   | 36        |
| 2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....  | 37        |
| 3. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik .....  | 37        |
| 4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....   | 38        |
| G. Hasil Penelitian Terdahulu.....   | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>40</b> |
| A. Jenis Penelitian.....   | 40        |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....   | 40        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 40        |
| D. Variabel Penelitian .....   | 41        |
| E. Populasi dan Sampel Penelitian .....  | 42        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....  | 42        |
| G. Teknik Analisis Data.....   | 44        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>   | <b>58</b> |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Melawi .....  | 58        |
| 1. Sejarah Kabupaten Melawi.....   | 58        |
| 2. Letak Geografis .....   | 58        |
| 3. Wilayah Administratif.....  | 60        |
| 4. Visi dan Misi Kabupaten Melawi.....   | 60        |
| 5. Keadaan Perekonomian Daerah .....   | 61        |
| 6. Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.....   | 62        |
| 7. Mata Pencaharian .....  | 62        |
| B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan<br>Asset Daerah Kabupaten Melawi..... | 63        |
| 1. Visi DPPKAD Kabupaten Melawi.....   | 63        |
| 2. Misi DPPKAD Kabupaten Melawi .....  | 64        |
| 3. Bagan Struktur DPPKAD Kabupaten Melawi .....  | 65        |
| 4. Kondisi Sumber Daya MANusia DPPKAD Kabupaten Melawi .....                                     | 66        |
| 5. Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Melawi .....  | 66        |
| C. Gambaran Umum Pariwisata dan Potensi Perhotelan<br>Kabupaten Melawi .....                     | 73        |
| 1. Pariwisata .....  | 73        |
| 2. Perhotelan.....   | 76        |
| <b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>79</b> |
| A. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel.....   | 79        |
| B. Kinerja Pelayanan Petugas Pajak Hotel .....   | 82        |

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

|   |            |
|---|------------|
| 1. Uji Validitas.....                                 | 82         |
| 2. Uji Reliabilitas.....                              | 83         |
| 3. Pengolahan Data Menggunakan MAM.....               | 84         |
| C. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah ..... | 89         |
| 1. Uji Prasyarat Analisis .....                       | 91         |
| 2. Uji Statistik.....                                 | 93         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                           | <b>98</b>  |
| A. Kesimpulan .....                                   | 98         |
| B. Keterbatasan penelitian .....                      | 99         |
| C. Saran.....   | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                  | <b>103</b> |



**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Interpretasi Nilai TPI .....  | 44 |
| Tabel 3.2 Interpretasi Koefisien Reliabilitas.....  | 47 |
| Tabel 3.3 Skor Keterangan Sikap.....  | 48 |
| Table 3.4 Skala Sikap Responden.....  | 49 |
| Tabel 4.1 Komposisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Melawi .....   | 66 |
| Tabel 4.2 Nama dan Lokasi Hotel.....  | 76 |
| Tabel 4.3 Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar .....   | 77 |
| Tabel 4.4 Status Kepemilikan usaha .....  | 78 |
| Tabel 5.1 TPI Pajak Hotel DPPKAD Tahun 2006 s.d 2010 .....  | 79 |
| Tabel 5.2 Interpretasi Nilai TPI Pajak Hotel Tahun 2006 s.d 2010.....   | 80 |
| Tabel 5.3 Hasil pengujian Validitas .....   | 83 |
| Tabel 5.4 Hasil Pengujian Reliabilitas .....  | 84 |
| Tabel 5.5 Nilai Rata-rata dari Belief.....  | 85 |
| Tabel 5.6 Nilai Rata-rata dari Ideal.....   | 86 |
| Tabel 5.7 Perhitungan Bobot Setiap Atribut .....  | 87 |
| Tabel 5.8 Data Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kabupaten<br>Melawi Tahun 2006 s.d 2010..... | 89 |
| Tabel 5.9 Ringkasan Uji Normalitas .....  | 91 |
| Tabel 5.10 Ringkasan Uji Linieritas .....   | 92 |
| Tabel 5.11 Ringkasan Uji Heteroskedastisitas.....   | 93 |
| Tabel 5.12 Hasil Analisis Regresi Sederhana .....   | 94 |
| Tabel 5.13 Hasil Koefisien Determinasi .....  | 95 |
| Tabel 5.14 Hasil Ringkasan Uji t .....  | 96 |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  
Asset Daerah..... 65

Gambar II Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis..... 97



ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Yessy Melania  
NIM : 072114036  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2011

Tujuan penelitian ini untuk mengukur efektivitas pemungutan Pajak Hotel yang dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel terhadap target Pajak Hotel dan kinerja Petugas Pajak Hotel berdasarkan perspektif Wajib Pajak Hotel yang menggunakan Jasa Petugas Pajak Hotel. Penelitian ini juga mengukur kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yang kemudian dilanjutkan dengan uji pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pajak Dearah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah perbandingan antara realisasi terhadap target (pengukuran *Tax Performance Index* = TPI), analisis regresi sederhana dan penilaian kinerja Petugas Pajak Hotel menggunakan *Multiatribut Attitude Model* (MAM).

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel belum berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dari nilai TPI tahun 2006 adalah 27,82%, tahun 2007 adalah 28,56% tahun 2008 adalah 9,79%, tahun 2009 adalah 15,56% dan tahun 2010 adalah 24,04%. Perkembangan Pajak Hotel selama 5 (lima) tahun terakhir sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan kontribusi pada tahun 2006 adalah 5,9%, 2007 adalah 1,90%, tahun 2008 adalah 1,67%, tahun 2009 adalah 1,50% dan tahun 2010 adalah 3,02%. Hasil dari analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Pajak Hotel dan Pajak Daerah, dengan kontribusi efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah adalah 17,10%. Sementara itu untuk kinerja dari Petugas Pajak Hotel setempat nilai sikap keseluruhan menunjukkan angka 70,29 yang berada pada interval 0-100 yang berarti sangat memuaskan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX COLLECTION AND ITS  
CONTRIBUTION TO REGIONAL TAX OF MELAWI DISTRICT OF WEST  
KALIMANTAN PROVINCE

Yessy Melania

NIM : 072114036

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The purpose of this study was to measure the effectiveness of Hotel Tax collection as seen from the comparison between actual revenues against targets of Hotel Tax and Hotel Tax Officer performance based on the perspective of taxpayers who used the service of Hotel Tax officer. The study also measured the contribution of Hotel Tax to the regional Tax in 2006 until 2010, followed by a test of the influence of Hotel Tax on Regional Tax.

This type of study was a case study at the Department of Finance and Asset Management Revenue of Melawi District. The data collection techniques were interviews, literature study, questionnaires and documentation. The data analysis techniques used were the comparison between the realization and the target (measurement using Tax Performance Index = TPI), a simple regression analysis and performance assessment of Hotel Tax Officer using Multiattribute Attitude Model (MAM).

The result of data analysis showed that the Hotel Tax collection had not been effective, as shown from the TPI in 2006 was 27.82%, in 2007 was 28.56%, in 2008 was 9.79%, in 2009 was 15.56% and in year 2010 was 24.04%. The Hotel Tax Development for 5 (five) years was very low, it was shown by the contribution in 2006 was 5.9%, 2007 was 1.90%, in 2008 was 1.67%, in 2009 was 1.50% and year 2010 was 3.02%. Results from simple regression analysis showed that there was a positive and significant influence of Hotel Tax on Regional Tax, with an effective contribution of Hotel Tax to Regional Tax was 17.10%. Meanwhile, for the performance of the local Hotel Tax officer attitudes the overall value of 70.29 indicated that the number was at intervals of 000-100, which meant very satisfactory.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan Otonomi Daerah membawa berbagai dampak terhadap masyarakat dan Pemerintah Daerah, terutama mendekatkan pelayanan masyarakat dan membangkitkan potensi yang ada pada masyarakat. Dalam pelaksanaan penerapan Otonomi Daerah diharapkan Pemerintah Daerah lebih mampu untuk menggali potensi dan sumber-sumber daya daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain yang disahkan oleh daerah (Basuki, 2007: 71). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama dalam upaya penghimpunan dana yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah adalah Pajak Hotel. Untuk menggali potensi pemungutan Pajak Hotel, Pemerintah Kabupaten Melawi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

Pengoptimalisasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah erat kaitannya dengan sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Usaha untuk mengefektifkan pemungutan pajak daerah akan meningkatkan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari Pajak Hotel salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutannya. Efektivitas menunjukkan perbandingan antara output dengan tujuan (Suadi dalam Atmojo, 2009: 4). Realisasi penerimaan pajak sebagai output dan tujuannya sebagai target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (The dalam Rahmanto, 2007: 19).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Melawi mengelola 6 (enam) jenis Pajak Daerah. Salah satu Pajak daerah tersebut menjadi topik bahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Hotel. Menurut Data target dan realisasi pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi Tahun 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah masih sangat rendah.

Usaha untuk mengefektifkan pemungutan Pajak Hotel akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Hotel. Atas dasar inilah maka penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi ditinjau dari *Tax Performance Index (TPI)* tahun 2006–2010?
2. Bagaimana kinerja Petugas Pajak dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi?
3. Bagaimana kontribusi dan pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah selama tahun 2006-2010?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah. Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini hanya dibatasi pada data target penerimaan Pajak Hotel, realisasi penerimaan Pajak Hotel, penerimaan Pajak

Daerah. Data yang digunakan adalah terbatas hanya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Pengisian kuesioner untuk menilai kinerja Petugas Pajak Hotel didasarkan pada persepsi dari Wajib Pajak Hotel yang dilayani.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi ditinjau dari *Tax Performance Index (TPI)* tahun 2006-2010.
2. Mengetahui sejauh mana kinerja Petugas Pajak dalam proses pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi.
3. Mengetahui kontribusi dan pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2006-2010.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan, khususnya Pajak Hotel dalam menganalisis kinerja pelaksanaan pemungutannya, kontribusi dan pengaruhnya terhadap Pajak Daerah, serta kinerja pelayanan dari Petugas Pajak Hotel.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, dalam hal ini termasuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Kabupaten Melawi untuk menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang diterima secara akademis terhadap implementasinya di lapangan.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian yaitu menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah, pajak secara umum, Pajak Hotel, mekanisme dan sistem pemungutan Pajak Hotel, konsep efektivitas, administrasi perpajakan, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah, pengukuran kinerja sektor publik elemen-elemen pengukuran

kinerja organisasi sektor publik, aspek dan manfaat pengukuran kinerja sektor publik serta penelitian terdahulu tentang kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi antara lain tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Melawi secara umum, gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta gambaran umum potensi perhotelan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Melawi.

### BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan mengolah dan menganalisis data, menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan merumuskan solusi yang ditawarkan untuk subyek penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Basuki (2007: 71) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, terdiri atas :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBD yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **B. Perpajakan**

### **1. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Beberapa ahli memberikan definisi tentang pajak. Menurut Supramono dan Theresia (2009: 2) definisi pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Senada dengan itu, Mardiasmo (2009: 1) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Kamus Ekonomi (2006: 613) menyebutkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk

membayai pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Pemungutan pajak hanya berhak dilakukan oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

2) Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa balas jasa secara langsung.

Tanpa balas jasa secara langsung (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered* (Mardiasmo, 2009: 1) :

- 1) Fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya.
- 2) Fungsi *regulered*, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

- 1) Pengelompokan pajak menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Mardiasmo, 2009: 5).

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Pengelompokan pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif (Mardiasmo, 2009: 5) :

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya

Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah (Mardiasmo, 2009: 6) :

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

d. Asas–asas Pemungutan pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009: 8) asas pemungutan pajak ada 3 (tiga), yaitu :

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas–asas yang melandasi pemungutan pajak. Supramono dan Theresia (2009: 3) menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan pada asas:

*a) Equality*

Dalam asas ini, pemungutan pajak harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi diantara Wajib Pajak. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

*b) Certainty*

Asas ini menyatakan bahwa penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya.

*c) Convenience*

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

*d) Economics*

Asas ini menyatakan bahwa biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah baik pusat maupun

daerah dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

e. Teori-teori Pemungutan Pajak

Dalam kaitannya dengan fungsi *budgetair*, pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan negara yang ditempuhnya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pada pajak yang telah ada.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori (Supramono dan Theresia, 2009: 2) :

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta wajib membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan

masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah.

### 3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmati dalam bentuk pajak. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

### 4) Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak.

### 5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

## f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2009: 6).

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assesment System* :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Self Assesment System* :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah satu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *With Holding System* adalah wewenang

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

g. Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak di Indonesia (Mardiasmo,2009:

9).

1) Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp1.000,00.

3) Tarif Progresif

Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

h. Stetsel Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stetsel (Mardiasmo, 2009: 6).

1) Stetsel nyata (*riel stetsel*)

Dalam stetsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stetsel anggapan (*fictive stetsel*)

Pengertian pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stetsel Campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara stetsel nyata dan stetsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

i. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 2009: 8) :

1) Ajaran Formal

Ajaran ini beranggapan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assesment system*.

2) Ajaran Materiil

Ajaran ini beranggapan utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *self assesment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah pembayaran, kompensasi, kadaluwarsa, pembebasan dan penghapusan.

j. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) (Mardiasmo, 2009: 8) :

1) Perlawanan pasif

Pada umumnya masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contoh bentuk dari perlawanan aktif antara lain :

a) *Tax avoidance*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang. *Tax avoidance* disebut sebagai penghindaran pajak. Beberapa pengertian berkaitan dengan penghindaran (Agustinawansari, 2009: 11) :

- a. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak menghindari kewajiban pajaknya tidak melanggar Undang-undang pajak. Dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan celah–celah aturan pajak untuk memperkecil kewajiban pajaknya.
- b. Usaha Wajib Pajak untuk mengatur peristiwa–peristiwa sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar kecil atau bahkan tidak dikenai pajak dan tidak melanggar aturan perpajakan.
- c. Usaha Wajib Pajak untuk memanipulasi penghasilan kena pajaknya secara legal, yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- d. Usaha Wajib Pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang masih dalam batas–batas ketentuan peraturan yang

berlaku. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak tidak melanggar Undang-undang.

b) *Tax evasion*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak). *Tax evasion* disebut sebagai penyelundupan pajak. Beberapa pengertian penyelundupan pajak (Agustinawansari, 2009: 12).

- a. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghapus utang pajak tidak didasarkan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak menghindari kewajiban pajaknya dengan cara melanggar Undang -undang Pajak.
- b. Usaha yang tidak dapat dibenarkan berkaitan dengan usaha Wajib Pajak untuk melarikan diri atau menghindari dari pengenaan pajak.
- c. Usaha Wajib Pajak untuk memanipulasi penghasilan kena pajak secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- d. Tindakan Wajib Pajak yang melanggar Undang-undang.

## 2. Pajak Hotel

### a. Pengertian Pajak Hotel

Secara umum Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khususnya disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang

menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari peraturan tentang Pajak Hotel ini adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, penulis lengkapi dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel Kabupaten Melawi

c. Obyek dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel yang Berlaku Secara Nasional

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk atau dikecualikan dari obyek Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sementara Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

d. Obyek dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi

Obyek Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Pada dasarnya Pajak Hotel adalah pajak tidak langsung yang dipungut atas pelayanan hotel kepada pembeli, dimana pembeli baik pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Pajak ini bersifat objektif yaitu menekankan pada pelayanan yang disediakan oleh hotel, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, *telex*, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, *golf*, *pub*, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sementara yang dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Asrama dan pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

### 3. Mekanisme dan Sistem Pemungutan Pajak Hotel

#### a. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Adapun tata cara perhitungan dan penetapan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- 2) Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- 3) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), SKPDLBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah Nihil (SKPDN).
- 5) SKPDKB diterbitkan :
  - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenai sanksi administrasi, berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dihitung saat terutangnya pajak.

6) SKPDLBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

7) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

8) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan.

- 9) Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

b. Tata Cara Pembayaran

Adapun tata cara pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- 2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud point (1) dan (2) diatas dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- 4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang, dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada point (4) diatas harus disesuaikan secara teratur dan berturut-turut

dengan kenaikan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- 6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

c. Tata Cara Penagihan Pajak

Tata cara dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat ijin, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.
- 3) Apabila jumlah pajak yang masuk harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- 4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### C. Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas bertumpu pada pendekatan tujuan diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran tersebut menunjukkan tingkat efektivitas (Gibson,dkk dalam Rulianto, 2005: 49). Menurut Koesoemaatmaja dalam Rulianto (2005: 33) “pengertian efektivitas adalah (hasil guna) perbandingan antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan”.

Sedangkan menurut Hidayat dalam Rulianto (2005: 34) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas adalah :

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Konsep ini telah tertuju pada pengeluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak bertujuan mencari laba) berorientasi pada pencapaian efektivitas.

Menurut Etsioni dalam Rulianto (2005: 34) “efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya.

Berdasarkan teori–teori tentang efektivitas diatas, dalam penelitian teori yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan Pajak Hotel ini yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dengan rencana/target yang telah ditentukan dengan menggunakan rumus *Tax Performance Index (TPI)*.

Menurut Soewondo dalam Rulianto (2005: 37), secara sederhana, efektivitas pemungutan pajak (*Tax Performance Index*) dapat dirumuskan/diformulasikan sebaga berikut:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

Apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari target penerimaan pajaknya, menunjukkan bahwa terjadi efektivitas didalam pemungutan pajak. Semakin besar nilai TPI, menunjukkan semakin efektif pula pemungutan pajaknya.

Menurut Rulianto (2005: 39), efektivitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, efektivitas pemungutan pajak diwujudkan dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Devas dalam Rulianto (2005: 41), “efektivitas adalah untuk mengukur antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak tersebut, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar pajak masing–masing dan membayar seluruh pajak terhutang masing–masing”. Dari definisi tersebut, maka pengukuran efektivitas pajak hotel dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Hotel}}$$

Potensi pajak diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak dalam keadaan seratus persen.

#### **D. Administrasi Perpajakan**

Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah perlu didukung oleh administrasi perpajakan yang baik, dalam arti memenuhi sistem dan prosedur dalam pemungutan pajak. Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yakni pertama, instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak; kedua, orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dan ketiga, kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan (Mansury dalam Maziardi, 2001: 23).

Menurut Atmosudirjo dalam Rulianto (2005: 42), membagi pengertian administrasi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan tata usaha, sedangkan pengertian administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:

1. Administrasi dari sudut proses, yaitu merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan,

penggerakan, pengaturan, pengawasan, sampai dengan proses tercapainya tujuan.

2. Administrasi dari sudut fungsi, yaitu merupakan keseluruhan tindakan (aktivitas) yang mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang yang berkedudukan sebagai administrator atau pemimpin suatu usaha.
3. Administrasi dari sudut kepranataan (*institusion*) kelembagaan, yaitu sekelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas didalam lembaga.

Pada intinya, administrasi perpajakan adalah tahapan–tahapan atau langkah–langkah yang dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil. Menurut Devas dalam Maziardi (2001: 24) tahapan administrasi penerimaan pajak terdiri dari aktivitas menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak dan membukukan penerimaan.

Menurut Mansyuri dalam Rulianto (2005: 53), dasar–dasar bagi terselenggaranya administrasi yang baik meliputi :

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang–undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud adalah baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun

kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan dipatuhi untuk memenuhi kewajiban pajaknya oleh wajib pajak.

3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan sejak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan.
4. Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subjek dan objek pajak.

Terdapat tiga tolok ukur untuk menilai administrasi penerimaan daerah, khususnya administrasi pajak daerah. Ketiga tolok ukur tersebut adalah upaya pajak (*tax effort*), efektivitas pajak (*tax effectivity*) dan efisiensi pajak (*tax efficiency*). *Tax effort* merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, yang umumnya menggunakan angka PDRB. Dengan demikian *tax effort* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDRB.

Sedangkan *tax efficiency* mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi adalah alat ukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya-biaya pemungutan pajak bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efisiensi sama dengan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan biaya pemungutan pajak (Devas dalam Marziadi, 2001: 27).

*Tax effectivity* mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil pungutan suatu pajak (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa efektivitas pajak sama dengan realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi pajak (Devas dalam Marziadi, 2001: 26). Istilah yang lebih operasional untuk mengukur efektivitas pajak adalah *tax performance index* (TPI), yakni perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan rencana atau target penerimaan pajak. Istilah efektivitas juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (The dalam Rahmanto, 2007: 40). Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Rahmanto, 2007: 40).

#### **E. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, senada dengan itu, menurut Kamus Ekonomi (Guritno 1992: 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Menurut Hadi (1982:

42) kontribusi adalah sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Hotel terhadap besarnya Pajak Daerah.

## F. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

### 1. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun,dkk (2006: 157), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson) dalam (Mahsun,dkk 2006: 157).

### 2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Berikut ini merupakan elemen pokok pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahsun,dkk (2006: 158) :

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran–sasaran organisasi.
- d. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

3. Aspek–aspek pengukuran Kinerja Sektor Publik

Berikut ini aspek–aspek dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun,dkk (2006: 162) :

- a. Kelompok masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Kelompok proses (*process*), adalah ukuran kinerja, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*)
- d. Kelompok hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut BPKP (2000) dalam Mahsun,dkk (2006: 164) manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik adalah :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Rahmanto (2007) melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang cenderung meningkat. Pada tahun 2000 efektifitas pengelolaan Pajak Hotel adalah 43% yang berarti agak rendah, pada tahun 2001 adalah 56,92% yang berarti agak rendah, tahun 2002 adalah 66,46% yang berarti cukup, tahun 2003 adalah 81,38% yang berarti tinggi, dan pada tahun 2004 adalah 92,26% yang berarti tinggi. Sementara hasil kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang sebesar 10,9%.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel, diantaranya keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terutama pajak daerah, kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak, terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel dan tempat yang masih susah untuk dijangkau mengakibatkan Wajib Pajak kesulitan dalam membayar Pajak Hotel.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu bentuk penelitian yang memberikan gambaran tentang keadaan atau kenyataan yang ada, kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan tentang suatu aspek lingkungan sosial, termasuk manusia didalamnya, yang berlangsung sebagai peristiwa keseharian ataupun menurut momen-momen tertentu yang sifatnya temporal atau sewaktu-waktu.

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi dengan alamat Jl.Juang KM.2 Nanga Pinoh.
2. Penelitian dilaksanakan bulan Juni dan Juli 2011.

##### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ditetapkan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi. Sedangkan objek dari penelitian adalah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel, kontribusi dan pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah, serta kinerja

petugas pajak dalam mendukung pengoptimalisasian penerimaan Pajak Hotel di Melawi

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinum (Hasan,2004: 12). Sementara menurut Sugiyono (2006: 38) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel  
Dengan indikatornya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan target penerimaan Pajak Hotel.
2. Kinerja Petugas Pajak Hotel dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi.
3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah  
Dengan indikatornya realisasi penerimaan Pajak Hotel (variabel bebas atau X) dan realisasi penerimaan Pajak Daerah (variabel terikat atau Y).

### **E. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti (Sulistiyoso, 2010: 22). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak Hotel yang menggunakan jasa pelayanan dari Petugas Pajak Hotel di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sulistiyoso, 2010: 22). Namun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sampel karena populasi dari Wajib Pajak Hotel akan digunakan untuk menjawab semua pertanyaan dari peneliti.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data yang dibutuhkan dari penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang menduduki jabatan struktural atau yang duduk dalam posisi pimpinan, baik tingkat pimpinan puncak (*top management*), tingkat madya (*middle management*) maupun dengan staf (*lower management*) yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan Pajak Hotel. Selain itu juga dengan para Wajib Pajak sebagai informan lainnya, yang tentu diharapkan dapat memberikan data yang benar sehingga dapat membantu obyektivitas penulisan ini.

## 2. Studi kepustakaan

Hakekat dari studi kepustakaan adalah mengutip dari catatan atau karya orang lain, baik dalam bentuk buku-buku ilmiah, seperti Perpajakan, Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Mekanisme dan Perhitungan Perpajakan dan karya-karya ilmiah lainnya, maupun buku-buku non ilmiah seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta literatur-literatur lainnya yang erat kaitannya dengan rencana penelitian ini.

## 3. Angket (kuesioner)

Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti, baik populasi atau sampel (Hasan,2004: 24).

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk skala likert. Dimana hasil angket yang diperoleh akan digunakan untuk mengetahui kinerja Petugas Pajak Hotel dalam melayani Wajib Pajak Hotel.

## 4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi, serta data potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi.

**G. Teknik Analisis Data**

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel digunakan rumus Indeks Kinerja Pajak (*Tax Performance Index = TPI*) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan rencana (target) penerimaan Pajak Hotel. *Tax Performance Index* dihitung atas dasar target penerimaan Pajak Hotel, dengan rumus:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}}$$

Nilai *TPI* digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel yang diperoleh. Interpretasi nilai *TPI* tersebut adalah sebagai berikut (Arikunto dalam Rahmanto, 2007: 54):

Tabel 3.1  
Interpretasi Nilai *TPI*

| Besarnya Nilai <i>TPI</i>      | Interprestasi |
|--------------------------------|---------------|
| Antara 0,80 sampai dengan 1,00 | Tinggi        |
| Antara 0,60 sampai dengan 0,80 | Cukup         |
| Antara 0,40 sampai dengan 0,60 | Agak Rendah   |
| Antara 0,20 sampai dengan 0,40 | Rendah        |
| Antara 0,00 sampai dengan 0,20 | Sangat Rendah |

2. Kinerja Petugas Pajak

Menurut Hasan (2004: 15) untuk memenuhi kriteria sebuah penelitian yang dianggap sebagai penelitian ilmiah maka kecermatan pengukuran sangat diperlukan. Untuk itu ada dua syarat utama yang

harus dipenuhi oleh alat ukur untuk memperoleh suatu pengukuran yang cermat, yaitu sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi, validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal yang ingin diukur.

Dalam pengujian validitas sebagai patokannya atau pedoman indikator digunakan pedoman berikut :

- a) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5% maka instrumen dikatakan valid.
- b) Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5% maka instrumen dikatakan tidak valid.

Uji validitas angket dilakukan dengan rumus dari *Pearson* yang lebih dikenal dengan rumus koefisien korelasi *Pearson* ( $r$ ) :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

$r$  : Koefisien korelasi antara skor tiap–tiap item dengan skor total

$n$  : Jumlah sampel

$x$  : Skor indikator dari setiap pertanyaan

$y$  : Total skor dari setiap pertanyaan.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila diipergunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti lain tetap akan memberikan hasil yang sama. Jadi, reliabilitas adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang sama dalam mengukur hal dan subjek yang sama. Reliabilitas mengandung 3 makna yaitu tidak berubah-ubah, konsisten, dan dapat diandalkan.

Dalam pengujian realibilitas ini sebagai patokannya atau pedoman indikator tersebut digunakan pedoman berikut :

- a) Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka instrumen dikatakan reliabel.
- b) Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

Metode pengujian realibilitas yang digunakan adalah rumus

*Cronbachh's Alpha* :

$$r_{ii} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum ab^2}{at^2} \right)$$

Keterangan :

$r_{ii}$  : Koefisien reliabel

$k$  : Banyaknya butir soal

$ab^2$  : Jumlah varians butir

$\sigma^2$  : Varians total

Untuk melihat tingkat reliabilitas instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Interpretasi Koefisien Realibilitas

| Alpha          | Tingkat Reliabilitas |
|----------------|----------------------|
| 0,00 s.d 0,20  | Kurang Reliabel      |
| >0,20 s.d 0,40 | Agak Reliabel        |
| >0,40 s.d 0,60 | Cukup Reliabel       |
| >0,60 s.d 0,80 | Reliabel             |
| >0,80 s.d 1,00 | Sangat Reliabel      |

Sumber : Sugiyono:137

Untuk menganalisis kuesioner pengukuran kinerja petugas pajak di Kabupaten Melawi digunakan metode MAM (*Multiatribut Attitude Model*). Metode multiatribut yang digunakan adalah model angka ideal, dimana model tersebut memberikan informasi berkenaan dengan “merek ideal” dan juga informasi berkenaan dengan bagaimana merek yang sudah ada dipandang oleh konsumen (Engel,dkk.2008: 52-53). Dalam hal ini “merek ideal” merupakan pelayanan dari Petugas Pajak di Kabupaten Melawi. Model ini dirumuskan sebagai berikut :

$$A_b = \sum_{i=1}^n W_i |I_i - x_i|$$

Dimana :

$A_b$  = Sikap responden secara keseluruhan terhadap suatu objek

$W_i$  = Bobot rata-rata yang diberikan responden pada atribut  $i$

$I_i$  = Nilai ideal atau harapan rata-rata responden pada atribut  $i$

$X_i$  = Nilai *belief* atau kenyataan rata-rata responden pada atribut  $i$

$N$  = Nilai atribut yang diteliti

Berikut ini penentuan skala sikap dalam bentuk skor 1 sampai 5 untuk masing-masing atribut:

Tabel 3.3  
Skor Keterangan Sikap

| Keterangan sikap                         | Skor atau nilai |
|--|-----------------|
| Sangat setuju/sangat penting             | 5               |
| Setuju/penting                           | 4               |
| Ragu-ragu                                | 3               |
| Tidak setuju/tidak penting               | 2               |
| Sangat tidak setuju/sangat tidak penting | 1               |
| Total                                    | 15              |

Sumber : Sugiyono, 2004: 92-94

Untuk menentukan sikap responden secara keseluruhan terhadap suatu objek terlebih dahulu digunakan rumus-rumus berikut:

- a. Menentukan nilai bobot rata-rata yang diberikan responden digunakan rumus berikut :

$$W_i = \frac{\text{Nilai masing-masing atribut}}{\text{Jumlah nilai atribut}} \times 100\%$$

b. Menentukan nilai ideal atau harapan responden digunakan rumus berikut :

$$I_i = \text{Skor} \times \text{jumlah responden ideal masing-masing alternatif jawaban}$$

Menentukan nilai ideal rata-rata digunakan rumus berikut :

$$\text{Nilai ideal rata-rata} = \frac{\text{Total nilai ideal}}{\text{Jumlah responden}}$$

c. Menentukan nilai *belief* atau kenyataan responden digunakan rumus berikut :

$$X_i = \text{Skor} \times \text{jumlah responden belief masing-masing alternatif jawaban}$$

Menentukan nilai belief rata-rata digunakan rumus berikut :

$$\text{Nilai belief rata-rata} = \frac{\text{Total nilai belief}}{\text{Jumlah responden}}$$

d. Menurut Sugiono (2004: 92) interpretasi nilai perhitungan sikap responden adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Skala Sikap Responden

| Skala Nilai | Keterangan        |
|-------------|-------------------|
| 0 – 100     | Sangat Puas       |
| 101 – 200   | Puas              |
| 201 – 300   | Cukup puas        |
| 301 – 400   | Tidak Puas        |
| 401 – 500   | Sangat tidak puas |

### 3. Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Melawi digunakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah seperti pada rumus berikut :

$$r = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Untuk melihat pengaruh kedua variabel dalam hal ini Pajak Hotel dan Pajak Daerah menggunakan statistik parametrik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan satu variabel prediktor.

#### 1. Uji Prasyarat Analisis

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang berupa uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Salah satu cara untuk melakukan uji normalitas data adalah analisis

*Kolmogorov-Smirnov*, dengan hipotesis:

$H_0$  : data diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

$H_a$  : data diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal.

Apabila nilai p value (Sig.)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang berarti data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Apabila nilai p value (Sig.)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti data diambil bukan dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan analisis *Kolmogrov Smirnov* menggunakan bantuan program SPSS *17.0 for windows*.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, selanjutnya diuji keberartian garis regresi serta linearitasnya. Untuk pengujian linearitas, hanya output ANOVA Tabel yang digunakan. Uji hpotesis ditentukan sebagai berikut :

$H_0$  : model regresi linear.

$H_a$  : model regresi tidak linear.

Apabila nilai p value (Sig.)  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang berarti model regresi linear. Apabila nilai p value (Sig.)  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model regresi tidak linear. Uji linieritas menggunakan uji F dengan bantuan program komputer *SPSS 17.0 for Windows*.

c. Uji Heterokedastistitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke

pengamatan-pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Hipotesis yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas dinyatakan sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat variasi data/homogen

$H_a$  : Terdapat variasi data/heterogen

Kriteria yang digunakan adalah  $H_0$  diterima apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Ghozali, 2009: 12). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS 17 for windows*.

## 2. Pengujian Hipotesis

Adapun langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

### a. Menentukan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan pengujian hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan hipotesis Alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis Nol ( $H_0$ ) merupakan hipotesis tentang ada tidaknya perbedaan yang umumnya diformulasikan untuk diolah,

sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah sebagai hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini.

$H_o$  : Tidak terdapat pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah.

$H_a$  : Terdapat pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah.

b. Pemilihan Uji statistik

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan statistik parameter yaitu regresi sederhana, dengan interpretasi output garis regresi, koefisien determinasi dan nilai uji hipotesis (uji t).

1) Analisis regresi linier sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam analisa regresi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah dalam bentuk linier. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel independen. Persamaan umum regresi linier sederhana yang diungkapkan Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Administrasi” adalah :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

Y' = Nilai dalam variabel yang diprediksikan

a = Nilai Y apabila X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai pada variabel independen

Koefisien a dan b dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X)^2 - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

X = variabel independen

a = *intercept* konstan

b = koefisien regresi

n = banyaknya sampel

## 2) Koefisien determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi mendekati

angka 1, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai korelasi  $r$  hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel  $X$  dan  $Y$ . Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi yang menyatakan besarnya persentase perubahan  $Y$  yang bisa diterangkan oleh variabel  $X$  melalui hubungan  $X$  dengan  $Y$ .

Adapun rumus koefisien determinasi tersebut adalah :

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Keterangan :

KD : Nilai Koefisien determinasi

$r$  : Nilai koefisien korelasi

### 3) Uji Hipotesis (Uji $t$ )

Uji  $t$  ini merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $sig < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tujuan dari Uji t itu sendiri adalah untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk mengetahui uji t maka dicari menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

keterangan :

- $t_{hitung}$  : Statistik uji Korelasi  
 $r$  : Koefisien Korelasi *Pearson*  
 $r^2$  : Koefisien determinasi  
 $n$  : Jumlah data yang digunakan.

Hasil uji ini kemudian dibandingkan dengan harga kritis “t” dari tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

$H_0$  diterima jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , jika probabilitas  $>$  alfa 5% artinya korelasi tidak signifikan.

$H_a$  diterima jika  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , jika probabilitas  $<$  alfa 5% artinya korelasi signifikan.

Pengujian akan diuji dengan menggunakan dua pihak (*two tailed*). Selanjutnya nilai t hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai t dari tabel distribusi dengan derajat kebebasan (dk) sebesar n-2.

Semua pengujian statistik parameter yaitu regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t) ini akan dilakukan dengan program *SPSS 17 for windows*.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Melawi

##### 1. Sejarah Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten baru yang baru dibentuk. Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1213/SJ tanggal 21 Mei 2004 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan 13 Undang-undang tentang pembentukan 24 kabupaten, dimana Kabupaten Melawi merupakan salah satu dari 24 kabupaten yang baru dibentuk oleh Pemerintah. Dasar pembentukan Kabupaten Melawi adalah UU RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat. Peresmian Kabupaten Melawi bersama dengan 23 kabupaten lainnya dan 1 propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.

##### 2. Letak Geografis

Kabupaten Melawi terletak dibagian Timur propinsi Kalimantan Barat, dimana posisinya terletak pada  $0^{\circ}07' - 1^{\circ}21'$  LS serta  $111^{\circ}07' - 112^{\circ}27'$  BT. Batas wilayah administratif Kabupaten Melawi adalah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tumbang  
Semanang Kabupaten Kotawaringin Timur  
Propinsi Kalimantan Barat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Serawai  
Kabupaten Sintang.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sandai  
Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Melawi memiliki 81 desa dan 292 dusun dengan topografi perbukitan dengan luas 8.818,70 km<sup>2</sup> atau 82,85% dari luas Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi dialiri dua sungai yaitu Sungai Melawi dan Sungai Pinoh. Sungai Melawi membentang disebagian Kecamatan, yaitu Kecamatan Nanga Pinoh, Ella Hilir, Menukung (Kabupaten Melawi), Kecamatan Serawai dan Ambalau (Kabupaten Sintang), sedangkan Sungai Pinoh membentang mulai dari Kecamatan Nanga Pinoh, Sayan, Tanah Pinoh dan Sokan. Kedua sungai ini merupakan prasarana transportasi yang penting dan strategis bagi kecamatan – kecamatan yang berada disepanjang sungai tersebut, karena merupakan lalu lintas angkutan sungai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, Kabupaten Melawi memiliki kondisi tanah sebagai berikut :

Tanah Latosol : 650,838 ha (61,15%)

Tanah Podsolit : 413,562 ha (38,85 %)

Tanah Orgasonal : - ( 0 % )

Tanah Aluvial : - (0%)

Dalam konteks geologi, tanah Podsolit memiliki profil sedang, berwarna merah sampai kuning, horizon argilik, masam, kurus dengan kemampuan pertukaran kation dan kejenuhan basah yang rendah. Jenis tanah Latosol merupakan jenis tanah yang sudah memiliki perkembangan profil, horizon tanah ini terselubung warna coklat, merah hingga kuning dengan tekstur liat dan struktur lemah hingga berkumpal lemah konsistensi gembur. Sedangkan untuk formasi geologi Kabupaten Melawi termasuk dalam cekungan Melawi bagian utara.

### 3. Wilayah Administratif

Kabupaten Melawi memiliki luas wilayah seluas 10.640,80 km<sup>2</sup> dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Sokan dengan luas 1577,2 km<sup>2</sup> atau sebesar 14,82% dari luas kabupaten secara keseluruhan. Sementara kecamatan terkecil adalah Kecamatan Belimbing Hulu dengan luas 454,0 km<sup>2</sup> atau sebesar 4,27% dari luas keseluruhan. Kabupaten Melawi terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Sokan, Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat, Sayan, Belimbing, Belimbing Hulu, Nanga Pinoh, Nanga Pinoh Selatan, Pinoh Utara, Ella Hilir dan Menukung. Kabupaten Melawi memiliki 81 desa dan 292 dusun.

### 4. Visi dan Misi Kabupaten Melawi

Pembentukan Kabupaten Melawi bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Bagi pemerintah Kabupaten Melawi, visi yang ditetapkan merupakan motivasi bagi seluruh pegawai dan masyarakat di Kabupaten Melawi dan pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan Kabupaten Melawi adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Melawi yang aman, damai, maju dan sejahtera dengan pemerintahan demokratis dan berkeadilan.

Sementara misi Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
  - c. Pemberdayaan masyarakat disegala bidang.
  - d. Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Memacu berkembangnya kemandirian masyarakat dan daerah.
  - f. Penegakan hukum dan HAM
  - g. Membangun terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat.
  - h. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik
  - i. Mewujudkan aparatur pemerintahan Kabupaten Melawi yang kreatif, produktif, visioner, professional, bersih dan akuntabel.
5. Keadaan Perekonomian Daerah

Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Melawi lebih didukung oleh sektor pertanian, dimana mata pencaharian utama penduduk Kalimantan Barat termasuk Indonesia secara keseluruhan adalah bertani. Sektor utama tanaman pangan Kabupaten Melawi terdiri

dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Sedangkan sektor utama tanaman perkebunan adalah karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, lada, kakao dan aneka tanaman lainnya.

#### 6. Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Melawi memiliki berbagai macam sumber daya alam yang berpotensi untuk terus dikembangkan, diantaranya hutan dengan luas kawasan sekitar 1.064.400 hektar, sehingga peruntukan hutan tersebut sebagai berikut :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a. Hutan PPA              | : 50.011,40 Ha  |
| b. Hutan Lindung          | : 237.547,90 Ha |
| c. HPT                    | : 417.358,14 Ha |
| d. Hutan Produksi Biasa   | : 191.443,13 Ha |
| e. Hutan Konservasi       | : 4.680,60 Ha   |
| f. Pertanian lahan kering | : 163.358,83 Ha |

Selain hutan, Kabupaten Melawi memiliki sumber daya alam yang bersumber dari hasil pertambangan, diantaranya emas, uranium, migas, batu mica, batu bara, bijih besi dan pasir kuarsa. Kuasa pertambangan di Kabupaten Melawi diantaranya adalah PT. Estara Melawi di Kecamatan Menukung dan PT. Parwindo di Kecamatan Sokan.

#### 7. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Melawi pada umumnya masih bekerja dibidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa

potensi wilayah Kabupaten Melawi sebagian besar masih merupakan lahan pertanian. Meskipun demikian, banyak juga penduduk Kabupaten Melawi yang bekerja sebagai pegawai dan pedagang.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi**

### **1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dituntut untuk dapat merespon serta mengantisipasi perubahan yang berkembang terutama dengan tuntutan reformasi yang menuntut adanya pemerintah yang baik yang ditandai dengan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat, penegak hukum yang berkeadilan, transparansi, *responsive*, konsesus *oriented*, hak berkeadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategik.

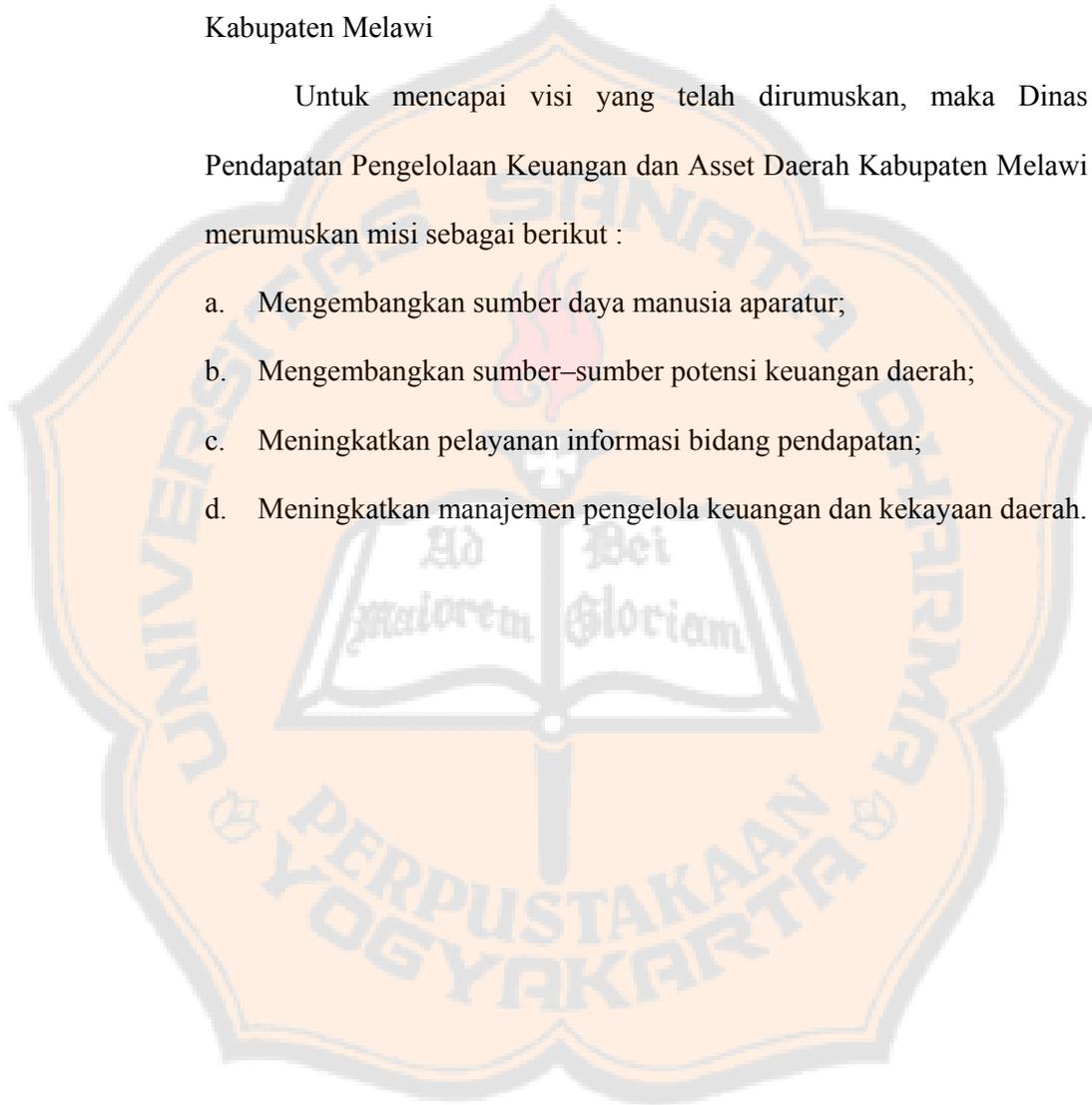
Perubahan tersebut harus dengan tahapan yang terencana, terarah, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu visi yang jelas sebagai suatu cara pandang kedepan, kemana organisasi akan diarahkan serta target apa yang harus dicapai, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi merumuskan visinya adalah

terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel dalam rangka *good governance* dan kemandirian daerah.

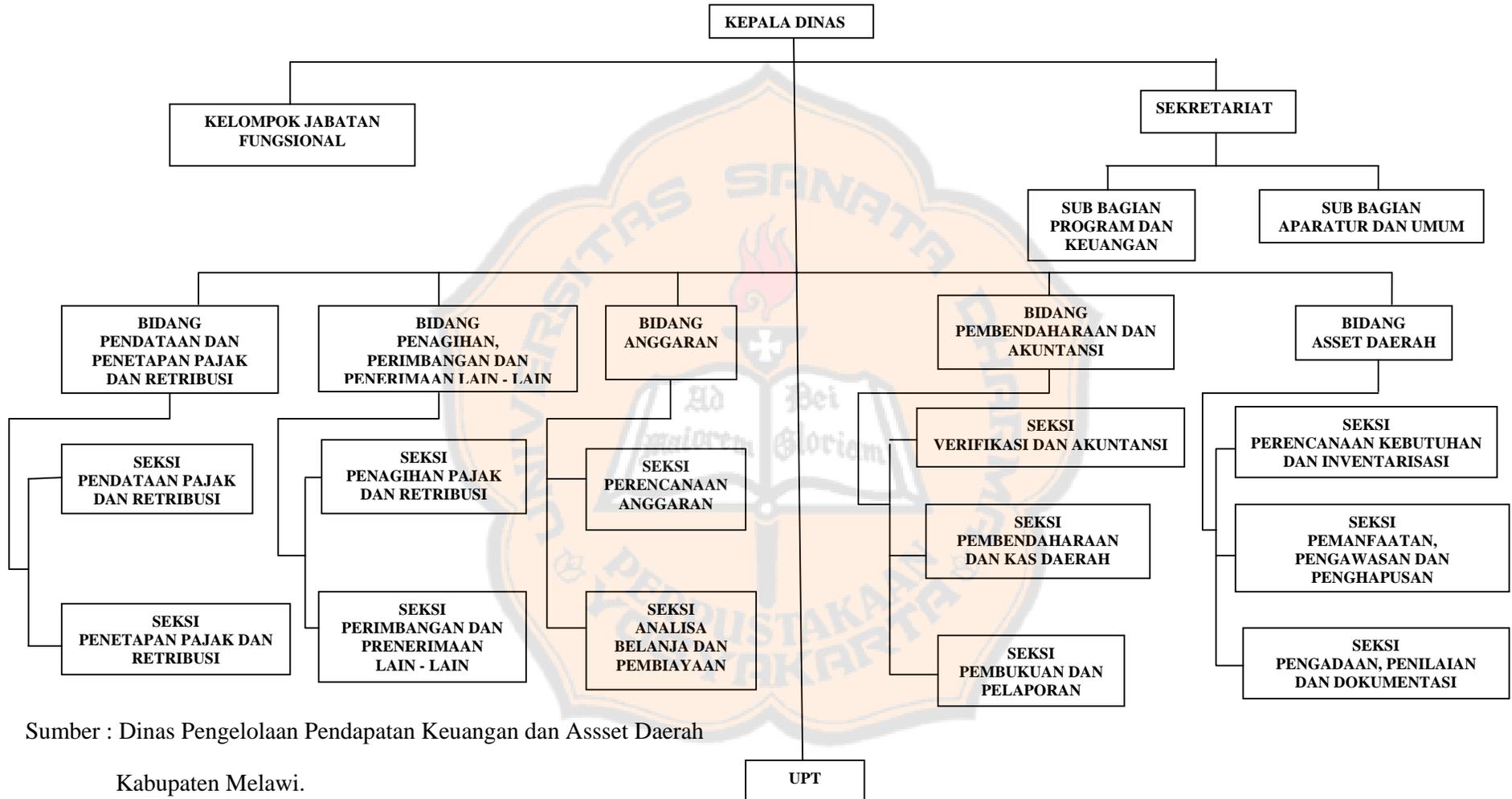
2. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi merumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia aparatur;
- b. Mengembangkan sumber-sumber potensi keuangan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan informasi bidang pendapatan;
- d. Meningkatkan manajemen pengelola keuangan dan kekayaan daerah.



3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah



Sumber : Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Assset Daerah

Kabupaten Melawi.

4. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Assset Daerah Kabupaten Melawi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dalam pengadministrasian Pajak Hotel sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang ada pada DPPKAD Kabupaten Melawi adalah sebanyak 17 yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 12 orang laki-laki sedangkan dari segi kualitas tingkatan pendidikan pegawai pada DPPKAD Kabupaten Melawi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Komposisi Pegawai DPPKAD Kabupaten Melawi  
Menurut Tingkat dan Jenis Pendidikan

|    | Tingkatan Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Master (S2)          | 3              |
| 2. | Sarjana (S1)         | 12             |
| 3. | Sarjana Muda (D III) | 2              |
|    | Jumlah               | 17             |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Melawi tahun 2010

5. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

a. Kepala Dinas

Tugas pokok dari Kepala Dinas adalah memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kewenangan dibidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penetapan rencana kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah;
- 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan instansi lainnya;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
- 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
- 6) Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara periodik;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bagian Sekretariat

Tugas dari bidang sekretariat adalah membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) Penyusunan program Kerja Dinas;
- 3) Pelaksanaan ketatausahaan keuangan dinas;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Aparatur, organisasi dan tata laksana Dinas;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan Dinas;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja Dinas;
- 7) Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi

Tugas dari bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi adalah membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana

pengembangan bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
- 2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengembangan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) Perumusan penetapan dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
- 8) Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi secara periodik;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat sesuai dengan pokok dan fungsinya.

d. Bidang Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain

Tugas dari bidang Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain adalah membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan

koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja dibidang Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan serta penyusunan perencanaan teknis Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain;
- 3) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta pengawan dan perlindungan Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain;
- 4) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Anggaran dan Pembendaharaan secara periodik;
- 5) Pelaksanaan tugas lain Bidang Penagihan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat sesuai dengan tugas pokok fungsinya;

e. Bidang Anggaran

Tugas dari Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Anggaran;
- 2) Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Anggaran;
- 4) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Anggaran;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Pelaksanaan tugas lain di Bidang Anggaran yang diserahkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat.

f. Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi

Tugas dari Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembendaharaan dan Akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja di Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi;
- 2) Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Pembendaharaan dan Akuntansi;

- 4) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pembendaharaan dan Akuntansi;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Pelaksanaan tugas lain di Bidang Pembendaharaan dan Akuntansi yang diserahkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat.

g. Bidang Aset Daerah

Tugas dari Bidang Aset Daerah adalah membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana operasional Bidang Aset Dearah;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Aset Daerah;
- 3) Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
- 4) Pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- 5) Pengelolaan penghapusan barang daerah;
- 6) Pentatausahaan aset daerah (meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin)
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada bidang aset daerah secara periodik;

- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat sesuai dengan pokok dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dinas dilapangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis menjalankan fungsi melaksanakan tugas dinas/badan dengan wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

**C. Gambaran Umum Pariwisata dan Potensi Perhotelan Kabupaten Melawi**

1. Pariwisata

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi disuatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara (skala nasional) maupun daerah (skala regional).

Adapun manfaat dari pariwisata adalah :

- a. Mendorong pembangunan yang berkesinambungan melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi keindahan alam dan kekayaan budayanya dengan pemanfaatan perkembangan teknologi yang maju dan tepat guna sehingga dapat memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.
- b. Ikut melestarikan kebudayaan daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan unsur-unsur budaya itu sendiri.

Dilihat dari potensi Kabupaten Melawi yang merupakan daerah perbukitan, banyak obyek dan daya tarik wisata yang belum diketahui atau dikelola dengan sempurna, misalnya wisata alam Bukit Matok Kecamatan Belimbing.

Menurut sifatnya, pariwisata dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu wisata alam, wisata belanja dan wisata budaya. Namun di Kabupaten Melawi hanya terdapat dua jenis wisata, yaitu :

- a. Wisata Budaya
  - 1) Kesenian daerah
  - 2) Rumah panjang
  - 3) Makam bersejarah
  - 4) Tugu peringatan perjuangan kemerdekaan RI
  - 5) Telapak kaki diatas batu
  - 6) Patung manusia, kucing dan anjing
  - 7) Batu kapal
  - 8) Tempat ibadah

b. Wisata Alam

- 1) Bukit Baka di Menukung
- 2) Bukit Matok Permai di Belimbing
- 3) Air Terjun Sarai Empangai di Nanga Pinoh
- 4) Air Terjun Berasap di Belimbing
- 5) Air Terjun Netak di Ella Hilir
- 6) Air Terjun Siling Lubang Kutter
- 7) Ram Kenebak
- 8) Riam Siling
- 9) Riam / Jeram sepanjang Sungai Pinoh
- 10) Gunung Kerapau
- 11) Gunung Sengiang
- 12) Hutan Lindung
- 13) Taman Agro Wisata Matuari

Untuk menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, maka pemerintah setempat perlu melakukan tindakan insentif yang dapat merangsang perkembangan pariwisata yang nantinya berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Melawi sangat membantu perkembangan potensi perhotelan setempat.

2. Perhotelan

Sebelum mengadakan pembahasan dan pengujian terlebih dahulu akan disajikan gambaran umum potensi perhotelan setempat, yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

a. Nama dan Lokasi Hotel

Berikut ini disajikan mengenai nama dan lokasi hotel yang ada di Kabupaten Melawi tahun 2006 sampai dengan 2010 :

Tabel 4.2  
Nama dan Lokasi Hotel

| No. | Nama Hotel / Losmen       | Lokasi         |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1   | Losmen Gunung Wenang I    | Kota Melawi    |
| 2   | Losmen Gunung Wenang II   | Kota melawi    |
| 3   | Losmen Kasuari            | Kota Melawi    |
| 4   | Penginapan Limur Bernaung | Kota Melawi    |
| 5   | Losmen Jaya Indah         | Kota melawi    |
| 6   | Losmen Mawar Indah        | Kota Melawi    |
| 7   | Losmen Bukit Belian       | Kota Melawi    |
| 8   | Penginapan Inang Bolai    | Kota Melawi    |
| 9   | Hotel Pinoh permai        | Kota Melawi    |
| 10  | Penginapan Kenangan       | Kota Kota Baru |

Sumber : Data penelitian

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 9 losmen dan 1 hotel sangat berdekatan dimana 9 hotel tersebut berada dalam satu wilayah atau kota. Lokasi yang sangat berdekatan tersebut memungkinkan untuk terjadi persaingan antara pengelola hotel, dan hal tersebut dapat berdampak positif maupun negatif. Positifnya pengelola hotel berupaya memberikan servis layanan yang terbaik bagi kenyamanan pelanggan dengan maksud menarik pengunjung lebih banyak lagi.

Negatifnya, untuk menang bersaing yang ditekan biasanya harga sewa penginapan, dengan tidak melalukan pungutan pajak kepada penginap, sehingga terkesan murah.

b. Nama Hotel, Jenis kamar dan Jumlah Kamar

Berikut ini dipaparkan mengenai jenis kamar dan jumlah kamar Hotel di Kabupaten Melawi dari tahun 2006 sampai tahun 2010 berdasarkan masing – masing hotel :

Tabel 4.3  
Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar

| No. | Nama Hotel                | Jenis Kamar | Jumlah Kamar | Tarif Kamar   |
|-----|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.  | Losmen Gunung Wenang I    | VIP I       | 2            | Rp 45.000,00  |
|     |                           | VIP II      | 4            | Rp 40.000,00  |
|     |                           | VIP III     | 3            | Rp 27.500,00  |
|     |                           | Standar     | 8            | Rp 20.000,00  |
|     |                           | Ekonomi I   | 2            | Rp 12.500,00  |
|     |                           | Ekonomi II  | 3            | Rp 10.000,00  |
|     |                           | Ekonomi III | 6            | Rp 7.500,00   |
| 2.  | Losmen Gunung Wenang II   | VIP I       | 3            | Rp 75.000,00  |
|     |                           | VIP II      | 3            | Rp 60.000,00  |
|     |                           | VIP III     | 7            | Rp 55.000,00  |
|     |                           | VIP III A   | 2            | Rp 55.000,00  |
|     |                           | VIP III B   | 5            | Rp 50.000,00  |
|     |                           | Standar I   | 6            | Rp 30.000,00  |
|     |                           | Standar II  | 2            | Rp 30.000,00  |
| 3.  | Losmen Kasuari            | Lantai I    | 4            | Rp 55.000,00  |
|     |                           | Lantai II   | 8            | Rp 60.000,00  |
|     |                           | Lantai III  | 8            | Rp 50.000,00  |
| 4.  | Penginapan Limur Bernaung | Executive   | 4            | Rp 120.000,00 |
|     |                           | VIP A       | 4            | Rp 75.000,00  |
|     |                           | VIP B       | 4            | Rp 60.000,00  |
|     |                           | VIP C       | 10           | Rp 50.000,00  |
|     |                           | Standar     | 4            | Rp 35.000,00  |
|     |                           | Ekonomi A   | 4            | Rp 30.000,00  |
| 5.  | Losmen Jaya Indah         | VIP         | 4            | Rp 40.000,00  |
|     |                           | Standar     | 6            | Rp 35.000,00  |
|     |                           | Ekonomi     | 7            | Rp 20.000,00  |

Tabel 4.3  
 Nama Hotel, Jenis, Jumlah kamar dan Tarif Kamar  
 (Lanjutan)

|     |                           |             |    |               |
|-----|---------------------------|-------------|----|---------------|
| 6.  | Losmen<br>Mawar Indah     | Lantai I    | 6  | Rp 15.000,00  |
|     |                           | Lantai II   | 10 | Rp 8.000,00   |
| 7.  | Losmen<br>Bukit Belian    | Lantai I    | 12 | Rp 20.000,00  |
|     |                           | Lantai II   | 2  | Rp 20.000,00  |
|     |                           | Lantai III  | 10 | Rp 18.000,00  |
| 8.  | Penginapan<br>Onang Bolai | Ekonomi I   | 1  | Rp 15.000,00  |
|     |                           | Ekonomi II  | 5  | Rp 10.000,00  |
|     |                           | Ekonomi III | 7  | Rp 7.500,00   |
| 9.  | Penginapan<br>Kenangan    | Ekonomi I   | 6  | Rp 10.000,00  |
| 10. | Hotel Pinoh<br>Permai     | VIP         | 10 | Rp 130.000,00 |
|     |                           | Standar A   | 7  | Rp 80.000,00  |
|     |                           | Standar B   | 12 | Rp 65.000,00  |
|     |                           | Ekonomi     | 4  | Rp 35.000,00  |
| 11. | Losmen<br>Kharisma        | VIP         | 4  | Rp 125.000,00 |
|     |                           | Standar     | 9  | Rp 80.000,00  |
|     |                           | Ekkonomi    | 9  | Rp 50.000,00  |

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar yang dikategorikan sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Hotel adalah losmen dan penginapan.

c. Status Kepemilikan Usaha

Berikut ini dipaparkan mengenai Pengusaha Hotel Kabupaten

Melawi berdasarkan status kepemilikan usaha :

Tabel 4.4  
 Status Kepemilikan Usaha

| No | Status       | Frekuensi |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Perseorangan | 11        |
| 2  | Badan Hukum  | -         |

Sumber : Data primer yang diolah.

**BAB V**

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**A. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel**

Pengukuran tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dilakukan dengan menggunakan rumus indeks kinerja pajak hotel (*Tax Performance Index = TPI*) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan rencana (target) penerimaan Pajak Hotel.

Perhitungan untuk memperoleh angka *Tax Performance Index* guna menilai tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel di wilayah Kabupaten Melawi tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1  
*Tax Performance Index* Pajak Hotel  
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  
Tahun 2006 s.d 2010

| No. | Tahun | Target<br>Penerimaan | Realisasi<br>Penerimaan | Tax<br>Performance<br>Index (TPI) |
|-----|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | 2006  | Rp 46.017.500,00     | Rp 12.803.950,00        | 0,28                              |
| 2.  | 2007  | Rp 69.300.000,00     | Rp 19.792.136,00        | 0,29                              |
| 3.  | 2008  | Rp 173.250.000,00    | Rp 16.969.500,00        | 0,10                              |
| 4.  | 2009  | Rp 207.900.000,00    | Rp 32.355.500,00        | 0,16                              |
| 5.  | 2010  | Rp 234.036.000,00    | Rp 56.265.960,00        | 0,24                              |

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa angka rasio TPI Pajak Hotel selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif, dimana

angkanya berkisar antara 0,10 (terendah) hingga 0,29 (tertinggi). Berpedoman pada tabel 3.1, maka hasil perhitungan angka TPI dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Interpretasi Nilai TPI Pajak Hotel  
Tahun 2006 s.d 2010

| Tahun | Tax Performance Index | Interpretasi  |
|-------|-----------------------|---------------|
| 2006  | 0,28                  | Rendah        |
| 2007  | 0,29                  | Rendah        |
| 2008  | 0,10                  | Sangat rendah |
| 2009  | 0,16                  | Sangat rendah |
| 2010  | 0,24                  | Rendah        |

Sumber : data yang diolah

Hasil interpretasi tersebut telah memperlihatkan bahwa pemungutan Pajak Hotel belum berjalan dengan efektif, yang berarti realisasi penerimaan Pajak Hotel masih sangat jauh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan administrasi Pajak Hotel belum mampu menjaring seluruh potensi penerimaan pajak, dengan asumsi bahwa target penerimaan pajak telah sesuai dengan potensi penerimaan yang ada.

Tinggi rendahnya angka rasio TPI Pajak Hotel bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal organisasi pemungut pajak maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor – faktor yang terdapat didalam organisasi pengelola Pajak Hotel, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi. Faktor internal ini bisa berupa penetapan rencana

anggaran penerimaan Pajak Hotel yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan potensi perhotelan dilapangan. Hal ini dilihat berdasarkan jumlah hotel, kelas hotel dan tarif kamar hotel yang ada pada di Kabupaten Melawi masih sangat rendah. Selain itu, kemungkinan yang terjadi bisa juga disebabkan karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kurang memperhatikan dan mengetahui bagaimana penyusunan suatu anggaran yang baik dan benar.

Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini mencakup berbagai aspek yang luas, diantaranya dari Wajib Pajak Hotel itu sendiri yang bisa saja melakukan upaya penghindaran wajib pajak, kesengajaan wajib pajak untuk tidak membayar pajak.

Rendahnya tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, dalam hal ini terutama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain harus memperhatikan faktor-faktor diatas, dalam penetapan rencana penerimaan Pajak Hotel juga harus memperhatikan faktor lain seperti misalnya potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat dan infrastuktur yang masih belum memadai. Karena pariwisata dan infrastuktur merupakan daya tarik bagi wisatawan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan tingkat hunian hotel yang nantinya akan meningkatkan pendapatan dibidang perhotelan yang diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian terget yang telah ditetapkan.

Dalam upaya peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Hotel diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik, yang dapat mencegah terjadinya penghindaraan pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak dan korupsi oleh petugas pajak.

### **B. Kinerja Pelayanan Petugas Pajak Hotel**

Untuk mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Melawi terhadap pelayanan petugas pajak khususnya Pajak Hotel setempat telah dibagikan 10 kuesioner kepada responden. Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji realibilitas untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas.

#### **1. Pengujian Validitas**

Item total statistik merupakan fokus utama dari uji validitas. Suatu item dapat dikatakan valid apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Penelitian ini menggunakan  $N = 10$  maka derajat bebasnya adalah  $N - 2 = 10 - 2 = 8$  dan  $P = 0,05$ . Berdasarkan informasi tersebut, maka dapat diketahui nilai  $r$  tabel *product moment* adalah 0,632. Berikut ini adalah hasil pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS 17 *for windows*:

Tabel 5.3  
Hasil Pengujian Validitas

| No. Item | r <sub>hitung</sub> |       | r <sub>tabel</sub> 5 % | Hasil |
|----------|---------------------|-------|------------------------|-------|
|          | Belief              | Ideal |                        |       |
| 1.       | 0,802               | 0,684 | 0,632                  | Valid |
| 2.       | 0,893               | 0,821 | 0,632                  | Valid |
| 3.       | 0,711               | 0,813 | 0,632                  | Valid |
| 4.       | 0,932               | 0,729 | 0,632                  | Valid |
| 5.       | 0,946               | 0,664 | 0,632                  | Valid |
| 6.       | 0,693               | 0,719 | 0,632                  | Valid |
| 7.       | 0,675               | 0,755 | 0,632                  | Valid |
| 8.       | 0,710               | 0,755 | 0,632                  | Valid |
| 9.       | 0,838               | 0,906 | 0,632                  | Valid |
| 10.      | 0,793               | 0,938 | 0,632                  | Valid |
| 11.      | 0,804               | 0,814 | 0,632                  | Valid |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil bahwa semua instrumen penelitian sikap responden yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak Hotel terhadap kinerja pelayanan petugas pajak hotel di Kabupaten Melawi adalah valid karena setiap item pertanyaan baik *belief* (pengalaman) maupun ideal (harapan) memiliki r hitung yang lebih besar dari pada r tabel dalam taraf signifikansi 5%.

## 2. Pengujian Realibilitas

Item reliabilitas statistik merupakan fokus utama pada uji realibilitas. Penelitian ini menggunakan  $N = 10$  maka derajat bebasnya adalah  $N - 2 = 10 - 2 = 8$  dan  $P = 0,05$ . Dari informasi tersebut diketahui nilai r tabel *product moment* adalah 0, 632. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian reliabilitas yang menggunakan rumus *alpha dari cronbach*:

Tabel 5.4  
Hasil Pengujian Reliabilitas

|   |       |
|---|-------|
| r-tabel   | 0,632 |
| <i>Cronbach's Alpha</i> dari <i>belief</i> (pengalaman) | 0,925 |
| <i>Cronbach's Alpha</i> dari ideal (harapan)            | 0,935 |

Dari hasil analisis didapat nilai Alpha untuk reliabilitas *belief* (pengalaman) sebesar 0,925 dan nilai Alpha untuk realibilitas ideal (harapan) sebesar 0,935, sedangkan nilai r tabel (uji 2 sisi) pada signifikansi 5% dengan  $n = 10$ , didapat sebesar 0,632. Maka dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan penelitian baik *belief* maupun ideal adalah reliabel.

Berpatokan pada tabel 3.2, nilai *alpha cronbach belief* adalah 0,925 yang terletak diantara 0,80 hingga 1,00 dan untuk *alpha cronbach* ideal adalah 0,935 yang juga terletak diantara 0,80 hingga 1,00, hal ini berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai r tabel 0,632, maka dapat dikatakan bahwa tingkat reliabilitas instrumen penelitian *belief* dan ideal adalah sangat reliabel.

### 3. Pengolahan Data Menggunakan MAM

Setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada kuesioner, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data menggunakan analisis MAM (*Multiatribut Attitude Model*) yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Nilai *belief* dalam penelitian ini adalah kondisi nyata atau pengalaman yang dialami oleh Wajib Pajak terhadap pelayanan Petugas

Pajak di Kabupaten Melawi. Nilai ideal adalah kondisi yang sebenarnya diharapkan oleh Wajib Pajak terhadap pelayanan Petugas Pajak Hotel setempat. Berikut ini adalah langkah – langkah dalam pengolahan data hasil kuesioner menggunakan metode MAM :

- a. Menghitung nilai rata-rata dari *belief* dan ideal

Tabel 5.5  
 Nilai rata – rata dari belief

| Atribut                              | Skor Belief |   |   |   |   | Jumlah | Nilai belief Rata - rata |
|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|--------|--------------------------|
|                                      | 5           | 4 | 3 | 2 | 1 |        |                          |
| <b>Indikator Input</b>               |             |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                               | 1           | 8 | 1 | - | - | 40     | 4                        |
| Item 2                               | 1           | 8 | - | 1 | - | 39     | 3,9                      |
| Total belief rata – rata = $7,9 / 2$ |             |   |   |   |   |        | 3,95                     |
| <b>Indikator Proses</b>              |             |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                               | 1           | 7 | 1 | 1 | - | 38     | 3,8                      |
| Item 2                               | -           | 3 | 6 | 1 | - | 32     | 3,2                      |
| Item 3                               | 2           | 7 | - | 1 | - | 40     | 4                        |
| Total belief rata – rata = $11 / 3$  |             |   |   |   |   |        | 3,67                     |
| <b>Indikator Outcome</b>             |             |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                               | 4           | 5 | - | 1 | - | 42     | 4,2                      |
| Item 2                               | 2           | 3 | 1 | 4 | - | 33     | 3,3                      |
| Total belief rata – rata = $7,5 / 2$ |             |   |   |   |   |        | 3,75                     |
| <b>Indikator Benefit</b>             |             |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                               | 5           | 1 | 3 | 1 | - | 40     | 4                        |
| Item 2                               | 2           | 7 | 1 | - | - | 41     | 4,1                      |
| Total belief rata – rata = $8,1 / 2$ |             |   |   |   |   |        | 4,05                     |
| <b>Indikator Impact</b>              |             |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                               | -           | 7 | 2 | 1 | - | 36     | 3,6                      |
| Item 2                               | 2           | 4 | 3 | 1 | - | 37     | 3,7                      |
| Total belief rata – rata = $7,3 / 2$ |             |   |   |   |   |        | 3,65                     |

Sumber : data yang diolah

Keterangan :

- 1. Mencari jumlah belief = skor x sikap
- 2. Mencari rata – rata belief = jumlah : responden

Tabel 5.6  
 Nilai rata – rata dari ideal

| Atribut                             | Skor Ideal |   |   |   |   | Jumlah | Nilai belief Rata – rata |
|-------------------------------------|------------|---|---|---|---|--------|--------------------------|
|                                     | 5          | 4 | 3 | 2 | 1 |        |                          |
| <b>Indikator Input</b>              |            |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                              | 7          | 3 | - | - | - | 47     | 4,7                      |
| Item 2                              | 3          | 5 | 2 | - | - | 41     | 4,1                      |
| Total belief rata – rata = 8,8 / 2  |            |   |   |   |   |        | 4,4                      |
| <b>Indikator Proses</b>             |            |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                              | 4          | 6 | - | - | - | 44     | 4,4                      |
| Item 2                              | 6          | 4 | - | - | - | 46     | 4,6                      |
| Item 3                              | 5          | 5 | - | - | - | 45     | 4,5                      |
| Total belief rata – rata = 13,5 / 3 |            |   |   |   |   |        | 4,5                      |
| <b>Indikator Outcome</b>            |            |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                              | 4          | 6 | - | - | - | 44     | 4,4                      |
| Item 2                              | 5          | 5 | - | - | - | 45     | 4,5                      |
| Total belief rata – rata = 8,9 / 2  |            |   |   |   |   |        | 4,45                     |
| <b>Indikator Benefit</b>            |            |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                              | 5          | 5 | - | - | - | 45     | 4,5                      |
| Item 2                              | 4          | 6 | - | - | - | 44     | 4,4                      |
| Total belief rata – rata = 8,9 / 2  |            |   |   |   |   |        | 4,45                     |
| <b>Indikator Impact</b>             |            |   |   |   |   |        |                          |
| Item 1                              | 5          | 5 | - | - | - | 45     | 4,5                      |
| Item 2                              | 3          | 7 | - | - | - | 43     | 4,3                      |
| Total belief rata – rata = 8,8 / 2  |            |   |   |   |   |        | 4,4                      |

Sumber : data yang diolah

Keterangan :

1. Mencari jumlah ideal = skor x sikap
  2. Mencari rata – rata ideal = jumlah : responden
- b. Menentukan bobot untuk masing – masing atribut

Setelah menghitung nilai total *belief* rata-rata dan total ideal rata-rata masing-masing dari atribut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bobot untuk masing-masing atribut dari nilai

*belief* dan nilai ideal. Berikut ini disajikan perhitungan penentuan bobot dari masing–masing atribut :

Tabel 5.7  
Perhitungan Bobot Setiap Atribut

| Atribut | Total belief rata-rata (Xi) | Total ideal rata-rata (Ii) | Selisih (Xi-Ii) | Urutan | Perhitungan Bobot   | Bobot |
|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|---------------------|-------|
| Input   | 3,95                        | 4,4                        | 0,45            | 2      | $2/15 \times 100\%$ | 13    |
| Proses  | 3,67                        | 4,5                        | 0,83            | 5      | $5/15 \times 100\%$ | 33    |
| Outcome | 3,75                        | 4,45                       | 0,70            | 3      | $3/15 \times 100\%$ | 20    |
| Benefit | 4,05                        | 4,45                       | 0,40            | 1      | $1/15 \times 100\%$ | 7     |
| Impact  | 3,65                        | 4,4                        | 0,75            | 4      | $4/15 \times 100\%$ | 27    |

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa atribut yang mempunyai selisih paling kecil adalah atribut benefit dengan nilai selisih 0,40 yang berarti atribut benefit ini memiliki kenyataan atau pengalaman mendekati dengan harapan dari responden, kemudian disusul atribut *input*, *outcome*, *impact* dan *proses*. Untuk mengukur sikap wajib pajak hotel yang menggunakan jasa pelayanan petugas pajak hotel terhadap indikator *input*, *proses*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* terlebih dahulu harus dilakukan perhitungan bobot tiap–tiap atribut dikalikan dengan selisih nilai *belief* dan ideal. Berikut disajikan perhitungan untuk mengukur sikap responden terhadap pelayanan petugas pajak setempat :

$$A_b = \sum_{i=1}^n W_i |I_i - x_i|$$

$$\begin{aligned} A_b &= 33 |4,5 - 3,67| + 27 |4,4 - 3,65| + 20 |4,45 - 3,75| + 13 |4,4 - 3,95| + 7 |4,45 - 4,05| \\ &= (33 \times 0,83) + (27 \times 0,75) + (20 \times 0,7) + (13 \times 0,45) + (7 \times 0,4) \\ &= 27,39 + 20,25 + 14 + 5,85 + 2,8 \\ &= 70,29 \end{aligned}$$

|             |      |            |            |                   |
|-------------|------|------------|------------|-------------------|
| Sangat puas | Puas | Cukup Puas | Tidak Puas | Sangat Tidak Puas |
|-------------|------|------------|------------|-------------------|

70,29

Keterangan :

- 0 – 100 = Sangat puas
- 101 – 200 = Puas
- 201 – 300 = Cukup puas
- 301 – 400 = Tidak puas
- 401 – 500 = Sangat tidak puas

Dari perhitungan diatas diketahui nilai sikap secara keseluruhan adalah sebesar 70,29, ini berarti bahwa sikap responden terhadap pelayanan petugas pajak hotel di Kabupaten Melawi sangat memuaskan karena angka tersebut berada pada rentang nilai 0–100. Hal ini berarti kepuasan dan harapan dari Wajib pajak hotel terhadap pelayanan petugas pajak hotel sudah terpenuhi.

### C. Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat diketahui melalui perbandingan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu disajikan data realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah seperti tabel berikut ini :

Tabel 5.8  
Data Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kabupaten  
Melawi Tahun 2006 s.d 2010

| Tahun       | Pajak Hotel      | Pajak Daerah        | Persentase Kontribusi |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 2006        | Rp 12.803.950,00 | Rp 215.600.409,00   | 5,93 %                |
| 2007        | Rp 19.792.136,00 | Rp 1.041.430.058,00 | 1,90 %                |
| 2008        | Rp 16.969.500,00 | Rp 1.013.957.724,00 | 1,67 %                |
| 2009        | Rp 32.355.500,00 | Rp 2.146.874.074,42 | 1,50 %                |
| 2010        | Rp 56.265.960,00 | Rp 1.860.736.660,00 | 3,02 %                |
| Rata – Rata |                  |                     | 2,80 %                |

Sumber : data primer yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.8 diatas dapat dilihat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah selama lima tahun terakhir masih sangat rendah . Angka kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2006 sebesar 5,93% yang berarti penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar 5,93% terhadap pajak daerah Kabupaten Melawi. Secara rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama lima tahun terakhir adalah berkisar pada angka 2,80% dengan angka kontribusi tertinggi sebesar 5,93% dan angka kontribusi terendah 1,50%.

Angka prosentase kontribusi yang sangat rendah ini memang menjadi perhatian khusus dari pihak dan instansi yang bertanggung jawab

dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi. Hal yang menjadi kendala teknis adalah kurangnya dukungan dan keterbukaan dari pemilik hotel dan penginapan dalam membayar dan melaporkan penghasilannya selama ini. Apabila pemilik hotel melakukan pembayaran pajak hotel, nilainya kurang logis dan sangat kecil dari nilai perkiraan petugas Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupten Melawi.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian dilapangan, rendahnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah juga disebabkan karena potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Melawi belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah setempat, yang diharapkan dapat menarik perhatian pengunjung sehingga akan meningkatkan tingkat hunian penginapan/hotel. Hal tersebut akan meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah. Selain itu, infrastruktur seperti jalan, jembatan, terminal, pasar yang masih sangat belum memadai juga menjadi penyebab kurangnya kunjungan dan mobilitas dari pengunjung luar Kabupaten Melawi.

Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik.

1. Hasil Uji Prasyarat Analisis

Sebelum melanjutkan uji statistik untuk uji pengaruh variabel X (Pajak Hotel) terhadap variabel Y (Pajak Daerah), terlebih dahulu disajikan hasil perhitungan dari uji prasyarat analisis sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan teknik analisis *Kolmogorov-Smirnov* dan untuk perhitungannya menggunakan program *SPSS 17.00 for windows*.

Berdasarkan analisis dapat diringkas hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 5.9  
Ringkasan Uji Normalitas

| <i>Kolmogorov-Smirnov</i> | Signifikan | Keterangan |
|---------------------------|------------|------------|
| 0,891                     | 0,406      | Normal     |

Pada tabel 5.9 diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel pengganggu atau residual adalah sebesar 0,406 , nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ( $p > 0,05$ ), maka dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria pengujian linearitas adalah jika harga F hitung lebih kecil dari pada F tabel, pada taraf signifikansi 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini:

Tabel 5.10  
Ringkasan Uji Linieritas

| Variabel                   | F hitung | F tabel | P     | Keterangan |
|----------------------------|----------|---------|-------|------------|
| Pajak Hotel → Pajak Daerah | 0,208    | 4,10    | 0,651 | Linier     |

Hasil uji linieritas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung pada variabel penelitian lebih kecil dari pada nilai F tabel ( $F_{hitung} < F_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ( $P > 0,05$ ), hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah linier.

c. Uji Heterokedastistitas

Salah satu asumsi pokok dalam regresi linear adalah bahwa variansi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain adalah tidak sama. Apabila variansi tersebut tidak sama, maka berarti telah terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas digunakan uji *Glejser*. Jika variabel independen

tidak signifikan secara statistik ( $p > 0,05$ ), maka ada indikasi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah ringkasan hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 5.11  
Ringkasan Uji Heteroskedastisitas

| Variabel    | Sig.  | Kesimpulan                        |
|-------------|-------|-----------------------------------|
| Pajak Hotel | 0,651 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer diolah

Tabel 5.11 di atas menunjukkan bahwa variabel pajak hotel mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05 ( $p > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi pada penelitian ini.

## 2. Hasil Pengujian statistik

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi linear sederhana dengan interpretasi output koefisien determinasi, nilai t hitung dan signifikansi (uji t parsial) dan persamaan regresi.

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien regresi sederhana menggunakan bantuan program SPSS 17:

Tabel 5.12  
Hasil Analisis Regresi Linear

| Variabel               | B     | t-hitung | Sig.  | Kesimpulan |
|------------------------|-------|----------|-------|------------|
| Pajak Hotel            | 7,328 | 2,804    | 0,008 | Signifikan |
| Konstanta = 28.950.000 |       |          |       |            |
| R = 0,414              |       |          |       |            |
| R <sup>2</sup> = 0,171 |       |          |       |            |
| t-tabel = 2,021        |       |          |       |            |
| Sig. = 0,008           |       |          |       |            |

Sumber: Data sekunder diolah

Dari hasil analisis regresi sederhana tersebut diketahui persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = 28.950.000 + 7,328 X$$

Nilai a sebesar 28.950.000 merupakan sebuah konstanta yang menunjukkan besarnya variabel Y jika variabel X tidak memiliki nilai atau sama dengan nol. Dengan pengertian lain yaitu Pajak Daerah akan bernilai 28.950.000 jika tidak terdapat penerimaan Pajak Hotel. Sedangkan nilai b sebesar 7,328 merupakan sebuah koefisien regresi yang akan menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi pada Pajak Hotel. Nilai koefisien variabel Pajak Hotel bernilai positif sebesar 7,328 artinya apabila Pajak Hotel mengalami peningkatan, maka akan diikuti oleh peningkatan Pajak Daerah. Jadi, setiap kenaikan penerimaan Pajak Hotel akan menyebabkan naiknya penerimaan Pajak Daerah sebesar 7,328.

b. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan koefisien

determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi yang menyatakan besarnya persentase perubahan Y yang bisa diterangkan oleh X melalui hubungan X dan Y. Adapun hasil dari koefisien determinasi berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.13  
Hasil Koefisien Determinasi

| Koefisien Korelasi | Koefisien Determinasi |
|--------------------|-----------------------|
| 0,414              | 0,171                 |

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji R<sup>2</sup> pada penelitian ini diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dipengaruhi oleh Pajak Hotel sebesar 17,10%, atau bisa dikatakan sumbangan efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah adalah 17,10% sedangkan sisanya sebesar 82,90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

c. Uji Hipotesis (Uji t Parsial)

Uji t ini merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $sig < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil statistik uji t untuk variabel Pajak Hotel diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari toleransi kesalahan  $\alpha = 0,05$ , dan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel, yaitu  $2,804 > 2,021$ . Oleh karena variabel Pajak Hotel signifikan dan koefisiennya bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah.

Adapun nilai  $t_{hitung}$  dapat dilihat pada output SPSS berikut :

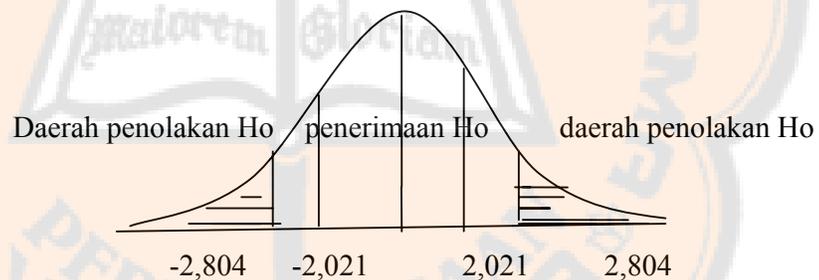
Tabel 5.14  
Hasil Ringkasan Uji t

| t-hitung | t-tabel | Sig.  | B     |
|----------|---------|-------|-------|
| 2,804    | 2,021   | 0,008 | 7,328 |

Sumber : Data Primer yang diolah.

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} = 2,804$ . Kemudian nilai  $t_{hitung}$  tersebut dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan menggunakan

uji dua pihak, maka diperoleh  $t_{tabel} = 2,021$ . Ternyata nilai  $t_{hitung}$  2,804 lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  2,021 sehingga kriteria yang memenuhi pengambilan keputusan adalah  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yaitu yang menyatakan bahwa Pajak Hotel (variabel X) sebagai variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah (variabel Y) sebagai variabel dependen. Oleh karena variabel Pajak Hotel signifikan dan koefisiennya bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. Kurva penolakan dan penerimaan hipotesis :



Gambar II  
Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis

Berdasarkan pada gambar diatas, dinyatakan bahwa  $t$  hitung jatuh pada daerah penolakan  $H_0$ , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah ditolak, dan hipotesis alternatif diterima.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari *Tax Performance Index (TPI)*, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Melawi tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah rendah dan sangat rendah, dengan presentase berkisar antara 9,79% dan 28,56%.
2. Berdasarkan pengujian dan pengolahan hasil kuesioner dengan menggunakan metode *Multiatribut Attitude Model (MAM)*, kinerja pelayanan petugas pajak di Kabupaten Melawi adalah sangat memuaskan, hal ini dibuktikan dari hasil nilai sikap responden sebesar 70,29% berada pada interval 0–100 (semakin mendekati nol) yang berarti responden semakin puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pajak hotel setempat.
3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dari tahun 2006 sampai tahun 2010 berfluktuatif, berkisar antara 1,50% dan 5,93%. Dari hasil analisis menggunakan regresi sederhana, disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pajak Daerah.

## B. Keterbatasan Penelitian

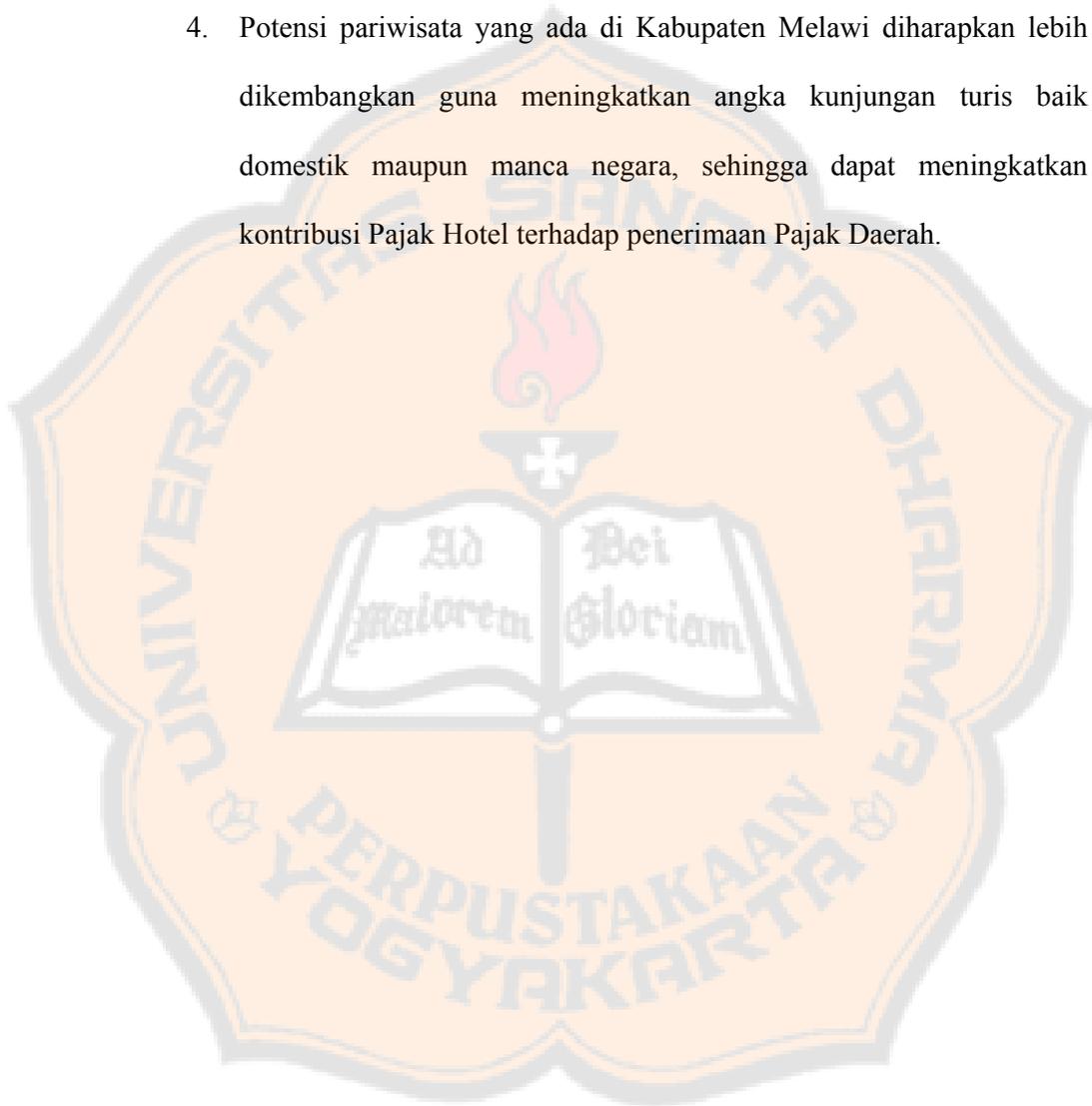
1. Variabel target penerimaan Pajak Hotel diasumsikan sama dengan potensi penerimaan Pajak Hotel.
2. Komponen *Benefit* (D1) dan *Impact* (E1) dalam kuesioner berdasarkan persepsi pengguna. Ada kemungkinan pengisi kuesioner terbatas pengetahuan dalam hal ini.
3. Dalam penelitian ini, ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah, selalu dianggap *ceteris paribus*, yaitu faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi penerimaan pajak daerah dianggap konstan atau tetap.

## C. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel perlu ditingkatkan agar lebih mampu menjaring potensi perhotelan yang ada, terutama sistem administrasi dari pemungutan pajak hotel itu sendiri.
2. Penentuan target penerimaan pajak hotel perlu disesuaikan dengan keadaan perhotelan setempat dan potensi pariwisata yang ada jika memang penetapan target yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan angka efektivitas dan kontribusi yang sangat rendah.

3. Pelayanan petugas pajak di Kabupaten Melawi sangat memuaskan, maka sangat diharapkan keadaan ini bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
4. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Melawi diharapkan lebih dikembangkan guna meningkatkan angka kunjungan turis baik domestik maupun manca negara, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari, Gien. *Modul : Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Atmojo, Bayu Setyo. 2009. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Tesis*. Solo : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Engel, James F, dkk (Alih Bahasa Oleh F.X. Budiyanto). *Perilaku Konsumen, Jilid 1*. Tangerang : Binarupa Aksara Publisher.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasan, Iqbal. 2010. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mahsun, Mohamad, dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan : edisi revisi 2009*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Maziardi, Eddi. 2001. Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Hotel dan Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Tesis*. Jakarta: FISIP UI.
- Peraturan Daerah No.10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel, Kabupaten Melawi.
- Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. *Tesis*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Rulianto, Yuli Eko. 2005. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur. *Tesis*. Jakarta : FISIP UI.
- Sugiyono.2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta
- Sulistiyoso, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS*. Yogyakarta : Cakrawala.

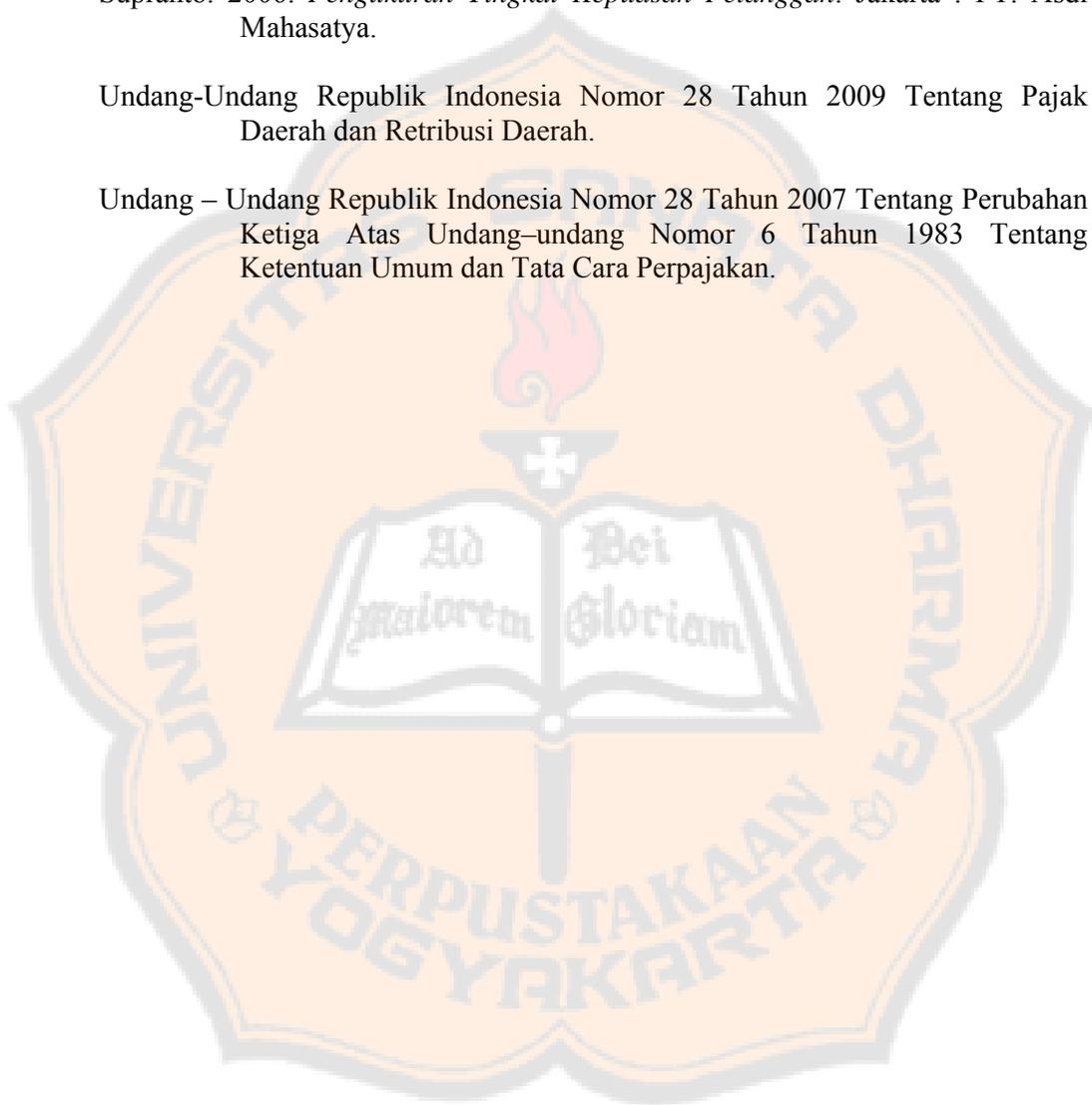
Sumadji, dkk. 2006. *Kamus Ekonomi Lengkap*. Wipress.

Supramono dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Supranto. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.





# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

**HASIL UJI PRASYARAT ANALISIS**

1. Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 40                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | -7.1761007E7            |
|                                  | Std. Deviation | 2.63061013E7            |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .141                    |
|                                  | Positive       | .141                    |
|                                  | Negative       | -.097                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z             |                | .891                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .406                    |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |             | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|------|
|              | B                           | Std. Error  | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant) | 6.908E7                     | 7229517.331 |                           | 9.555 | .000 |
| Pajak_Hotel  | 1.190                       | 2.613       | .074                      | .456  | .651 |

a. Dependent Variable: ABRESID

3. Hasil Uji Linieritas

**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F    | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|------|-------------------|
| 1     | Regression | 1.466E14       | 1  | 1.466E14    | .208 | .651 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 2.684E16       | 38 | 7.064E14    |      |                   |
|       | Total      | 2.699E16       | 39 |             |      |                   |

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Hotel

b. Dependent Variable: ABRESID

LAMPIRAN II

HASIL UJI STATISTIK REGRESI SEDERHANA

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .414 <sup>a</sup> | .171     | .150              | 26,577,509.15531           | 1.300         |

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Hotel

b. Dependent Variable: Pajak\_Daerah

ANOVA<sup>b</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 5.555E15       | 1  | 5.555E15    | 7.865 | .008 <sup>a</sup> |
|       | Residual   | 2.684E16       | 38 | 7.064E14    |       |                   |
|       | Total      | 3.240E16       | 39 |             |       |                   |

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Hotel

b. Dependent Variable: Pajak\_Daerah

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |             | Unstandardized Coefficients |             | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|------|
|       |             | B                           | Std. Error  | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)  | 2.895E7                     | 7229517.331 |                           | 4.005 | .000 |
|       | Pajak_Hotel | 7.328                       | 2.613       | .414                      | 2.804 | .008 |

a. Dependent Variable: Pajak\_Daerah

LAMPIRAN III

**KUESIONER BAGI WAJIB PAJAK**

**Petunjuk :**

1. Mohon bantuan dan kesediaan Anda untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada, apabila Anda sebagai Wajib Pajak Hotel pada Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
2. Beri tanda (X) pada kolom yang Anda pilih, sesuai dengan pengalaman (kesan) dari harapan Anda atas pelayanan Kantor Pajak Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. Keterangan pengalaman :  
 STS = Sangat tidak setuju  
 TS = Tidak setuju  
 N = Netral  
 S = Setuju  
 SS = Sangat setuju
4. Keterangan harapan :  
 STP = Sangat tidak penting  
 TP = Tidak penting  
 N = Netral  
 P = Penting  
 SP = Sangat Penting

**Daftar Pertanyaan :**

Berdasarkan pengalaman Anda selama ini, isilah lajur pengalaman dan harapan sesuai dengan kenyataan dan harapan Anda.

| NO.      | PERTANYAAN  | PENGALAMAN |    |   |   |    | HARAPAN |    |   |   |    |
|----------|---|------------|----|---|---|----|---------|----|---|---|----|
|          |   | STS        | TS | N | S | SS | STP     | TP | N | P | SP |
| <b>A</b> | <b>INPUT</b>  |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |
| 1.       | Petugas Pajak menguasai peraturan perpajakan dan terampil dalam bidang tugasnya.          |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |
| 2.       | Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel sudah cukup ringkas, jelas dan mudah dipahami. |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |
|          |   |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |
|          |   |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |



| E  | IMPACT  | PENGALAMAN |    |   |   |    | HARAPAN |    |   |   |    |  |
|----|---|------------|----|---|---|----|---------|----|---|---|----|--|
|    |   | STS        | TS | N | S | SS | STP     | TP | N | P | SP |  |
| 1. | Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Hotel.                                  |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |  |
| 2. | Terbinanya kerja sama dan hubungan yang harmonis antar masyarakat (Pengusaha Kena Pajak) dan Petugas Pajak. |            |    |   |   |    |         |    |   |   |    |  |



LAMPIRAN IV

HASIL PENGISIAN KUESIONER *BELIEF* (PENGALAMAN)

| No.<br>Responden | Jawaban Responden |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                  | Buti<br>r 1       | Buti<br>r 2 | Buti<br>r 3 | Buti<br>r 4 | Buti<br>r 5 | Buti<br>r 6 | Buti<br>r 7 | Buti<br>r 8 | Buti<br>r 9 | Buti<br>r 10 | Butir<br>11 |
| 1.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 5           | 2           | 3           | 4           | 4            | 4           |
| 2.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 5           | 2           | 3           | 4           | 4            | 4           |
| 3.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 5           | 2           | 3           | 4           | 4            | 4           |
| 4.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 4           | 4           | 5           | 4           | 3            | 3           |
| 5.               | 4                 | 5           | 3           | 4           | 5           | 4           | 5           | 5           | 5           | 4            | 4           |
| 6.               | 5                 | 4           | 5           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 5           | 4            | 5           |
| 7.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 4           | 4           | 5           | 4           | 3            | 3           |
| 8.               | 4                 | 4           | 4           | 4           | 5           | 5           | 5           | 5           | 4           | 4            | 5           |
| 9.               | 4                 | 4           | 4           | 3           | 4           | 4           | 3           | 5           | 4           | 4            | 3           |
| 10.              | 3                 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 3           | 2            | 2           |



LAMPIRAN VI

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER *BELIEF*

|    |                     | Correlations |        |        |        |        |       |       |       |        |        |        |        |
|----|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|    |                     | S1           | S2     | S3     | S4     | S5     | S6    | S7    | S8    | S9     | S10    | S11    | ST     |
| S1 | Pearson Correlation | 1            | .639*  | .896** | .745*  | .577   | .513  | .377  | .408  | .830** | .674*  | .745*  | .802** |
|    | Sig. (2-tailed)     |              | .047   | .000   | .013   | .081   | .129  | .283  | .242  | .003   | .033   | .013   | .005   |
|    | N                   | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     |
| S2 | Pearson Correlation | .639*        | 1      | .535   | .762*  | .922** | .688* | .517  | .652* | .822** | .775** | .587   | .893** |
|    | Sig. (2-tailed)     | .047         |        | .111   | .010   | .000   | .028  | .126  | .041  | .003   | .008   | .074   | .001   |
|    | N                   | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     |
| S3 | Pearson Correlation | .896**       | .535   | 1      | .535   | .518   | .674* | .180  | .366  | .546   | .645*  | .653*  | .711*  |
|    | Sig. (2-tailed)     | .000         | .111   |        | .111   | .125   | .032  | .619  | .298  | .103   | .044   | .041   | .021   |
|    | N                   | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     |
| S4 | Pearson Correlation | .745*        | .762*  | .535   | 1      | .861** | .497  | .758* | .609  | .867** | .704*  | .852** | .932** |
|    | Sig. (2-tailed)     | .013         | .010   | .111   |        | .001   | .144  | .011  | .062  | .001   | .023   | .002   | .000   |
|    | N                   | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     |
| S5 | Pearson Correlation | .577         | .922** | .518   | .861** | 1      | .740* | .652* | .707* | .719*  | .778** | .717*  | .946** |
|    | Sig. (2-tailed)     | .081         | .000   | .125   | .001   |        | .014  | .041  | .022  | .019   | .008   | .020   | .000   |
|    | N                   | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     |
| S6 | Pearson Correlation | .513         | .688*  | .674*  | .497   | .740*  | 1     | .039  | .209  | .383   | .830** | .714*  | .693*  |
|    | Sig. (2-tailed)     | .129         | .028   | .032   | .144   | .014   |       | .916  | .561  | .274   | .003   | .020   | .026   |



**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 10 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | .0    |
|       | Total                 | 10 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .925             | 11         |

**Item-Total Statistics**

|     | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| S1  | 37.80                      | 44.622                         | .776                             | .920                             |
| S2  | 37.90                      | 40.989                         | .868                             | .911                             |
| S3  | 38.00                      | 42.444                         | .649                             | .920                             |
| S4  | 38.60                      | 41.822                         | .918                             | .912                             |
| S5  | 37.80                      | 39.511                         | .931                             | .907                             |
| S6  | 37.60                      | 41.600                         | .615                             | .922                             |
| S7  | 38.50                      | 39.389                         | .559                             | .932                             |
| S8  | 37.80                      | 39.511                         | .612                             | .926                             |
| S9  | 37.70                      | 43.344                         | .812                             | .917                             |
| S10 | 38.20                      | 42.400                         | .752                             | .917                             |
| S11 | 38.10                      | 39.878                         | .747                             | .916                             |

LAMPIRAN VII

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER IDEAL

Correlations

|       |                     | Skor1 | Skor2 | Skor3  | Skor4 | Skor5  | Skor6 | Skor7 | Skor8 | Skor9 | Skor10 | Skor11 | Skor_total |
|-------|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|
| Skor1 | Pearson Correlation | 1     | .717* | .535   | .356  | .655*  | .535  | .218  | .218  | .535  | .655*  | .429   | .684*      |
|       | Sig. (2-tailed)     |       | .020  | .111   | .312  | .040   | .111  | .545  | .545  | .111  | .040   | .217   | .029       |
|       | N                   | 10    | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10         |
| Skor2 | Pearson Correlation | .717* | 1     | .467   | .408  | .429   | .467  | .714* | .714* | .758* | .714*  | .530   | .821**     |
|       | Sig. (2-tailed)     | .020  |       | .174   | .242  | .217   | .174  | .020  | .020  | .011  | .020   | .115   | .004       |
|       | N                   | 10    | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10         |
| Skor3 | Pearson Correlation | .535  | .467  | 1      | .667* | .816** | .583  | .408  | .408  | .583  | .816** | .802** | .813**     |
|       | Sig. (2-tailed)     | .111  | .174  |        | .035  | .004   | .077  | .242  | .242  | .077  | .004   | .005   | .004       |
|       | N                   | 10    | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10         |
| Skor4 | Pearson Correlation | .356  | .408  | .667*  | 1     | .408   | .667* | .408  | .408  | .667* | .816** | .535   | .729*      |
|       | Sig. (2-tailed)     | .312  | .242  | .035   |       | .242   | .035  | .242  | .242  | .035  | .004   | .111   | .017       |
|       | N                   | 10    | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10         |
| Skor5 | Pearson Correlation | .655* | .429  | .816** | .408  | 1      | .408  | .200  | .200  | .408  | .600   | .655*  | .664*      |
|       | Sig. (2-tailed)     | .040  | .217  | .004   | .242  |        | .242  | .580  | .580  | .242  | .067   | .040   | .036       |
|       | N                   | 10    | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10     | 10     | 10         |
| Skor6 | Pearson Correlation | .535  | .467  | .583   | .667* | .408   | 1     | .408  | .408  | .583  | .816** | .356   | .719*      |
|       | Sig. (2-tailed)     | .111  | .174  | .077   | .035  | .242   |       | .242  | .242  | .077  | .004   | .312   | .019       |



**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 10 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | .0    |
|       | Total                 | 10 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .935             | 11         |

**Item-Total Statistics**

|        | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Skor1  | 44.20                      | 18.400                         | .622                             | .933                             |
| Skor2  | 44.80                      | 16.178                         | .756                             | .929                             |
| Skor3  | 44.50                      | 17.611                         | .769                             | .927                             |
| Skor4  | 44.30                      | 18.011                         | .669                             | .931                             |
| Skor5  | 44.40                      | 18.267                         | .592                             | .934                             |
| Skor6  | 44.50                      | 18.056                         | .658                             | .931                             |
| Skor7  | 44.40                      | 17.822                         | .699                             | .930                             |
| Skor8  | 44.40                      | 17.822                         | .699                             | .930                             |
| Skor9  | 44.50                      | 17.167                         | .883                             | .922                             |
| Skor10 | 44.40                      | 16.933                         | .922                             | .920                             |
| Skor11 | 44.60                      | 17.822                         | .774                             | .927                             |



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**Jl. Juang KM.2 Nanga Pinoh Telp. (0568) 22353 Fax**

Nanga Pinoh, 28 Juni 2011

Nomor : 800/~~2009~~/DPPKAD/ 2011

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Melakukan Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi

di-

Universitas Sanata Dharma

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tentang izin penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Yessy Melania

Program Studi : Akuntansi

telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi pada tanggal 25 dan 28 Juni 2011 untuk penelitian yang berjudul " Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat."

Demikian Surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya yang diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Melawi



**RUSMAHENDRI, SE.MM**

Pembina Tk.I

NIP.19670525 199703 1 009